



MIMBAR ULAMA

03 EDISI
1441 H/
2019M

SUARA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Harapan MUI

Ketika Kiai Ma'ruf Menjadi Wapres

Syarah Mufti Mekah atas
Kitab Ulama Jawi

Jalan Sutra:
Xinjiang Sebagai Pintu Gerbang

Menjaga Warisan
Amal Habibie

Tantangan DPS di
Era Digital Ekonomi

MIMBAR
ULAMA

Pengelola
Majalah Mimbar Ulama

Penasehat:
Prof. Dr. Din Syamsuddin
Prof. Dr. Nasaruddin Umar
Prof. Dr. Azyumardi Azra
Prof. Dr. Didin Hafiduddin

Pemimpin Umum:
Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin

Wakil Pemimpin Umum:
Prof. Dr. Yunahar Ilyas
Drs. H. Zainut Tauhid
Sa'adi, M.Si
Dr. Anwar Abbas, M.Ag, MM

Pemimpin Redaksi:
Masduki Baidlowi

Wakil Pemimpin Redaksi:
Asrori S. Karni, Musthafa Helmy

Redaktur Senior:
Amirsyah Tambunan
Edy Kuscahyanto
Mabroer MS
Ibnu Hamad
Thobib Al-Asyhar

Dewan Redaksi Edisi Ini:
M. Nashih Nasrullah
M. Fakhruddin
A. Khoirul Anam
Elvi Hudhriyah
Muh. Azharun Ni'am

Sekretaris Redaksi:
M. Ichwanul Muslim

Bendahara Redaksi:
Hidayati, Iroh Siti Zuhroh

Foto:
Urip Jalal Abduh

Tata Usaha dan Keuangan:
Akbar Kurniawan
Yacob Nasution

Desain dan Cover:
Tammy Farid

Alamat Redaksi:
Jl. Proklamasi No. 51, Jakarta Pusat
10320.
Telp. 021-31902666, 021-03917853
<http://www.mui.or.id>



**Ekspektasi Estafet
Kepemimpinan MUI**

hal. 5



TANTANGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH MENGGELUTI
ERA EKONOMI DIGITAL

hal. 60

Catatan Anugerah
Syiar Ramadhan 2019

hal. 33



hal. 13

**KIAI MA'RUF SABAR MENDENGAR,
DAN ITU KEKUATAN BELIAU**



TAKLUKNYA FAKTA dan KEBENARAN

Oleh: Masduki Baidlowi

Ibarat adu jalan cepat berita yang benar (data dan fakta) itu berjalan tertatih-tatih. Ia hanya bergerak secara linier. Sementara berita bohong (*hoax*) berjalan sangat cepat, bahkan melompat-lompat secara eksponensial. Apa akibatnya?

Gampang ditebak. Kebenaran atau fakta kalah total. Ia dicampakkan masyarakat. *Hoax* lah sebagai pemenang: ia dipercaya dan diyakini publik. Singkatnya, kebohongan yang diulang-ulang lewat berbagai media (*multi platform*) akhirnya akan menjadi keyakinan publik. Itulah gambaran sederhana tentang *post truth* (pasca kebenaran). Era yang sedang kita alami sekarang.

Ada contoh menarik. Presiden Jokowi suatu saat bercerita bahwa, lebih dari sepuluh juta rakyat Indonesia percaya kalau dirinya adalah PKI. Informasi bahwa Presiden Indonesia asal Solo itu PKI, jelas berita bohong. Tetapi rakyat sangat yakin dan percaya atas berita bohong tersebut.

Keyakinan publik bisa demikian melekat karena berita bohong itu dibuat berulang-ulang menggunakan teknik *buzer* dengan teknologi *cyber army* yang amat canggih. Narasi beritanya pun dibuat dengan *angle* (sudut pandang) serta fokus yang berbeda-beda. Tak lupa, untuk meyakinkan publik biasanya berita bohong itu dibumbui fakta palsu dan argumentasi yang logis.



Post truth berjalan mengikuti derasnya penggunaan media sosial seiring dengan perubahan sistem informasi dari era konvensional ke sistem digital. Bahkan turunan (derivasi) dari *post truth* ini telah muncul propaganda model baru yang disebut “damkar kebohongan” (*firehose of falsehood*).

Metode ini semula dipakai Presiden Putin di Rusia saat merebut Semenanjung Krimea di Laut Hitam dari Negara Ukraina. Karena berhasil, maka ditiru Donald Trump dalam kampanye di AS untuk merebut kursi Presiden. Kalangan yang Pro-Brexit (setuju Inggris keluar dari Uni-Eropa), juga memakai metode serupa dan berhasil. Begitu pula negara-negara lain seperti kampanye yang memenangkan Presiden Bolsonaro di Brazil. Bahkan, metode ini juga dipakai dalam kampanye pemilihan presiden di Indonesia yang terakhir.

Post truth berikut turunannya *firehose of falsehood* (FoF) berjalan seiring dengan

maraknya media sosial yang digunakan sebagai alat komunikasi masyarakat. Dari total 263 juta penduduk Indonesia saat ini sudah 150 juta lebih mengakses informasi lewat internet. Sebagian besar (90%) mengakses internet itu menggunakan gajet atau *smart phone* untuk media sosial.

Fakta lain menunjukkan, pengguna medsos sebagian besar adalah generasi X (umur 25-40) dan milenial (umur 18-25) yang biasa disebut sebagai *digital native generation* (generasi yang cara memperoleh informasi murni lewat sistem digital). Sementara penduduk yang berumur 40 tahun ke atas disebut sebagai generasi *baby boomer*.

Istilah *baby boomer* semula dipakai di AS untuk penduduk yang lahir pasca Perang Dunia II atau setelahnya dengan rentang waktu yang tak terlalu jauh. Kelompok ini juga disebut sebagai generasi yang berpindah (migrasi) karena semula mereka memperoleh informasi lewat kertas (koran atau majalah), kemudian berpindah ke cara baru: sistem

informasi digital.

Contoh lain *post truth* adalah Tragedi hancurnya negara Irak di awal 1990-an. Negeri 1000 satu malam di bawah pimpinan Saddam Husein ini dituduh punya senjata pemusnah massal (*weapons of mass destruction*). Dalang penuduhnya tak lain adalah AS dan Inggris yang kemudian diikuti negara-negara sekutunya. Semula tak ada satu negara pun yang percaya atas tuduhan tersebut.

Tetapi lama-lama setelah berita itu diulang-ulang dengan berbagai *angle* dan argumentasi yang logis, publik banyak yang percaya. Tekniknya pihak AS, antara lain, membeberkan foto-foto muntase korban perang Iran-Irak serta korban Suku Kurdi yang ingin merdeka dari Irak di berbagai media internasional.

Akibat psikologisnya, pemerintah dan rakyat di negara-negara Teluk saat itu ketakutan lantaran percaya bahwa Irak punya senjata yang secara aturan internasional memang dilarang. Saat itulah Irak lantas dihabisi oleh Tentara Se-

kutu pimpinan AS (Presiden George Bush) dan Inggris (Perdana Menteri Tony Blair).

Irak luluh-lantak. Harta kekayaan dan berbagai artefak sejarah kebesaran masa lalu yang tak ternilai harganya itu dijarah AS dan Inggris. Begitu pula pundi-pundi *ghonimah* dari kekayaan minyak yang berada di perut bumi negeri Babilonia (saat itu Irak adalah

nah massal yang jadi tuduhan serta alasan untuk menyerang Irak itu. Adakah ia? Tidak pernah ada. Tetapi begitulah, era *post truth* telah dimulai dan digunakan secara zalim oleh AS dan sekutunya dengan sangat efektif.

Sukses di Irak, dengan teknik dan metode yang hampir serupa, AS dan sekutunya berpindah menyerang Libya,

Pertama, secara ekonomi AS dan sekutunya memperoleh *ghonimah* yang luar biasa, berupa kontrol terhadap produksi minyak dunia serta penguasaan jaringan bisnis minyak tingkat dunia. Semuanya makin dalam genggaman AS.

Kedua, secara politik negara Israel sebagai sekutu AS sangat diuntungkan: ia kehilangan musuh-musuh utamanya tanpa Israel ikut berperang. Irak dan Libya termasuk dua dari empat negara (Irak, Iran, Suriah dan Libya) yang dimusuhi Israel.

Itulah sebabnya, petualangan AS berikutnya hendak menaklukkan Suriah dan Iran. Namun terhadap dua negara yang disebut terakhir, AS mendapat ganjalan serius. Iran dan Suriah meladeninya dengan amat cerdas.

Dengan narasi dua contoh di atas, nampak jelas, betapa bahaya Era *post truth* berikut turunannya metode *FoF* tersebut. Bahaya karena, untuk membangun keyakinan publik tak dibutuhkan lagi fakta dan kebenaran. Kepercayaan publik cukup dibangun di atas kebohongan.

Nah, era *post truth* dan *FoF* itu, kini sedang melanda negeri ini. Hati-hatilah, karena yang dimainkan di antaranya isu agama, suku dan kesenjangan ekonomi. Akibatnya, sendi-sendi kebangsaan yang sudah lama kita bangun retak berlahan-lahan. ■



Illustrasi Konflik Negara Teluk

tiga besar pengekspor minyak dan gas dunia setelah Arab Saudi dan Iran) ini mengalir deras ke AS dan Inggris.

Akibat lanjutannya: rakyat Irak kini terlunta-lunta didera kemiskinan. Mereka mau mengungsi ke Eropa (termasuk ke Inggris) atau ke AS ditolak mentah-mentah. Pertanyaannya: di mana senjata pemus-

negara kaya minyak lainnya di Timur Tengah. Tak butuh waktu lama, negeri yang dipimpin Kolonel Muammar Kadhafi itu runtuh tinggal puing-puing. Bahkan sang kolonel Khadafi pun akhirnya mati mengenaskan.

Ada keuntungan ganda di balik petualangan politik dan militer AS dan sekutunya ini.



vecteezy.com

Ekspektasi Estafet Kepemimpinan MUI

Di bawah kepemimpinan Prof Dr KH Ma'ruf Amin, Majelis Ulama Indonesia telah bertransformasi menjadi organisasi keagamaan yang berkualitas dan berprestasi. Inovasi program keumatan dan kebangsaan telah berdampak nyata.

Di bidang pemberdayaan ekonomi umat, MUI memprakarsai lahirnya bank-bank syariah, regulasi ekonomi syariah, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Dan paling anyar adalah kehadiran bank wakaf mikro dan pembentukan tujuh Pusat Inkubasi Bisnis Syari'ah (Pinbas) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Sementara itu, dalam aspek sosial

keagamaan, MUI hadir sebagai wadah berkumpulnya ulama, *zu'ama* dan cedekiawan yang aktif memberikan solusi terhadap ragam problematika umat. Dengan bersinergi bersama pemerintah, MUI mengampanyekan Islam *Wasathiyah* (moderat) dalam upaya membendung gencarnya ekstremisme dan terorisme akhir-akhir ini.

Sederet catatan ini juga menjadi penekanan penting sejumlah MUI provinsi. Dalam konteks inilah, Redaksi Mimbar Ulama (MU), Asrori S Karni dan M. Nashih Nasrullah, berbincang dengan sejumlah pimpinan MUI provinsi, ihwal capaian dan prospek hubungan MUI dengan pemerintah ke depan. Berikut petikan perbincangan lengkapnya:



Sayang Kalau Beliau Lepas dari MUI



Prof Dr KH Aflatun Muchtar
Ketua Umum MUI Sumatra Selatan

Apa tanggapan Anda terkait capaian KH Ma'ruf memimpin MUI?

Sebagai Ketua Umum MUI, Kiai Ma'ruf berhasil, terutama mengembangkan ekonomi syariah dan perbankan syariah. Semakin hari semakin tumbuh berkembang, di berbagai provinsi dikembangkan festival syariah disponsori Bank Indonesia, seperti pada 2-4 Agustus lalu BI Regional Sumatra. Tuan rumahnya Provinsi Sumsel. Ini sangat relevan dengan kondisi sekarang, apalagi pengembangan wakaf.

Saya rasa, ide-ide beliau telah mengangkat harkat martabat ekonomi syariah. Dan saya berharap, ke depan bisa diteruskan generasi berikutnya. Apalagi beliau yang terpilih sebagai Wapres bisa mem-backup, sampai betul-betul ekonomi syariah ini membumi, sehingga umat Islam bukan hanya majority dalam jumlah namun minoritas dalam kualitas.

Artinya, ke depan umat ini harus mayoritas sekaligus unggul kualitas baik aspek *siyasa*, *qiyadah*, *iqtishadiyah*, dan *science*. Jadi, kalau keempat poin ini ditumbuhkembangkan calon *leaders* dan *next generation*, saya yakin negara

kita ini akan terwujud *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

Usai dilantik nanti sebagai Wapres, bagaimana kelanjutan kepemimpinan Kiai Ma'ruf di MUI?

Terkait Munas MUI nanti, siapa yang memimpin MUI, jika KH Ma'ruf tidak mau lagi karena sudah punya posisi Wapres, harus ada generasi mendatang. Tinggal di-floor-kan saja, siapa yang memang pantas dan patut menjadi ketua umum, pimpinan, atau *leader* MUI ke depan yang memiliki visi misi, minimal seimbang, syukur-syukur melebihi. Karena tantangan dan tuntutan ke depan jauh lebih hebat. Kita ingin pimpinan hebat, berkualitas, berintegritas, dan mempunyai komitmen membangun Islam *ya'lu wala yu'la alaih*.

Apa masih dimungkinkan, Kiai Ma'ruf tetap di beri tempat di MUI, meski bukan pimpinan harian?

Kita harapkan Munas 2020, seluruh elemen berpikir lebih jauh jika kemungkinan itu ada. Minimal beliau menjadi Dewan Pertimbangan MUI. Kalau lepas betul dari MUI, ya sayang. Beliau diharapkan masih dapat memberi masukan.

Relasi MUI Daerah - Pemda Perlu Dukungan Pusat

Prof Dr KH Abdul Hafidz Ansari
Wakil Ketua Umum MUI Kalimantan Selatan

Apa tanggapan Anda terkait capaian KH Ma'ruf memimpin MUI?

Kita rasakan kepemimpinan Kiai Ma'ruf bet-

ul-betul kepemimpinan yang meneladani Rasulullah SAW. Kepemimpinan sejuk, adem, damai, tapi tegas, bukan lembek lemah. Beliau menempatkan posisi ulama cendekia. Ulama dengan kecerdasan intelektual tinggi, memperjuangkan umat dengan sungguh-sungguh, dengan gaya indah dan kesejukan. Bukan dengan kekerasan. Bukan pernyataan-pernyataan bombastis yang bikin gerah. Walaupun ada yang disindir, tetapi dengan gaya halus dan menyejukkan. Sehingga apa yang disampaikan menyentuh pihak terkait.

Terhadap kita di daerah, beliau juga tidak mempersoalkan ini dan itu. Sekian problem pasti ada iya, tetapi cara penyelesaiannya tidak dengan cara-cara yang tidak bernuansa warat-satul anbiya'. Saya lihat kepemimpinan Rasul beliau terapkan. Bukan berarti beliau lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kedekatan beliau dan pemerintah itu salah satu bentuk keberhasilan beliau juga.

Pendekatan ini beliau pergunakan untuk memperjuangkan umat. Siapapun itu, dilakukan dengan cara bagus. Pendekatan dengan tidak menjilat pemerintah, tapi mencoba bersinergi tanpa kehilangan prinsip sebagai ormas Islam independen. Itu yang menarik. Pola ini kita harapkan tetap paten ketika beliau jadi pejabat struktural, pejabat publik, dan menjadi bagian penting pemerintah.

Saya berharap, ke depan beliau perjuangkan lebih intens, bisa berpengaruh untuk umat Islam lebih baik, karena posisi strategis sebagai Wapres. Kita bangga sekali. Luar biasa.

Apa harapan Anda atas peran Kiai Ma'ruf terhadap MUI setelah beliau menjadi Wapres?

Harapan kita, jangan lupakan. Tidak lepas sama sekali. Apapun alasannya, beliau orang MUI. Walau struktural, tidak lagi di MUI, karena memang AD/ART tidak boleh merangkap jabatan, MUI tanpa andil beliau tidak sebesar ini. Meski masing-masing Ketua MUI sebel-



Prof Dr H Abdul Hafiz Anshari, AZ, MA

umnya juga sudah berkontribusi besar.

Kedua, MUI daerah perlu mendapatkan dukungan untuk eksistensi, bagian terpenting kebijakan pembangunan daerah. Tidak sekadar organisasi himpunan ulama cendekia, tetapi juga organisasi yang dibutuhkan pemerintah daerah. Itu terbangun dengan baik jika Pemda mendapat dukungan pusat.

Ketiga, menyangkut ekonomi syariah, kita berharap keinginan beliau untuk mewujudkan arus baru ekonomi Indonesia yang beliau gaungkan di mana-mana, dibumikan lebih konkret dengan posisi beliau sebagai Wapres. Kita bukan memanfaatkan beliau, tetapi memang beliau berperan dengan posisi ini untuk mengembangkan ekonomi syariah dengan lebih baik. Apalagi beliau bisa setidaknya mendorong lembaga-lembaga di Pemda, bertransaksi dengan ekonomi syariah.

Jika diarahkan, perekonomian syariah bukan pelengkap derita, tetapi alternatif terbaik yang dipilih masyarakat Indonesia. Sasaran utama memang kaum muslim sendiri, tapi non-Muslim bisa tertarik. Ini bisa dilakukan tidak hanya oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI, tetapi juga pemerintah. Nah, posisi beliau sebagai Wapres, kelak sangat strategis. Beliau berhasil memposisikan MUI sebagai lembaga keper-

cayaan pemerintah. Nah, apalagi sekarang dengan posisi Wapres.

Usai dilantik nanti sebagai Wapres, bagaimana kelanjutan kiprah Kiai Ma'ruf di MUI?

Sejauh aturan AD/ART membolehkan, sebaiknya beliau terikat struktur. Misalnya ada struktur baru, apakah Dewan Penasihat, bisa juga Dewan Pertimbangan. Kita bahas lagi nanti. Akan lebih bagus beliau tetap terikat dalam struktur organisasi sebagai pemimpin, sehingga akan membawa pengaruh luar biasa, bukan saja untuk MUI sendiri, melainkan juga kepercayaan masyarakat.

Kedua, dari sisi kita sendiri, kita tidak seolah-olah beliau harus keluar. Itu kurang elok. Jasa beliau di MUI sangat besar. MUI seperti sekarang tidak bisa lepas dari beliau. Itu tidak dilupakan. Saya khawatir, keberhasilan beliau menjadi Wapres, meski saya yakin keberhasilan jadi Wapres bukan mutlak faktor beliau, saya khawatir orang lain jadi berebut jabatan Ketum MUI untuk jadi lompatan. Akhirnya MUI dijadikan alat. Bukan mustahil orang berambisi politik untuk memperoleh jabatan, ini yang kita khawatirkan.

Untuk kepemimpinan MUI ke depan, apa mungkin sosoknya dari luar, yang selama ini belum aktif di MUI?

Dari luar mungkin saja. Tapi kalau orang luar itu tidak memahami MUI dengan baik, harus kita pertimbangkan itu. Kecuali ada ketokohan dan komitmen ulama. Dia mencerminkan wajah ulama, bukan cuma cendekia. Untuk cendekia, silakan ada forumnya sendiri yaitu ICMI. Pemimpin MUI yang penting adalah faktor ulamanya. Tetapi tidak hanya fisik, juga ucapannya, dan sikapnya.

Susah Mencari Sosok Pengganti Kiai Ma'ruf



KH Dr Samlan Haji Ahmad
Ketua Umum MUI Maluku Utara

Apa tanggapan Anda terkait capaian KH Ma'ruf memimpin MUI?

Saya menilai, sebenarnya ini kepemimpinan ideal. Dari sisi capaian, terutama moderasi beragama dan bagaimana pengembangan ekonomi kreatif atau syariah yang beliau kembangkan. Terkait hubungan antarumat beragama, Pak Kiai Ma'ruf menggunakan kepemimpinan dingin, sehingga tidak timbulkan konflik, baik sesama umat Islam atau dengan umat yang lain. Islam wasathiyah-nya Kiai Ma'ruf ini, rasanya luar biasa. Kita mencari sosok pengganti Kiai Ma'ruf di MUI, agak susah. Malah teman-teman MUI Indonesia Timur menghendaki beliau menjadi Ketum terus, karena capaian tadi. Teman-teman membaca dan menghendaki sosok ini tidak berhenti di lima tahun pertama.

Bagaimana Anda melihat relasi MUI dan pemerintahan kedepan?

Saya sering kutip pendapat beliau, kita sebagai MU mempunyai *mas'uliyah wathaniyah* dan tanggung jawab keumatan. Beliau setiap saat tekankan tanggung jawab sebagai pengurus MUI. Dan saya rasakan sendiri, ketika ditunjuk sebagai Ketua MUI Malut, ketika ada persoalan politik atau keagaamaan di tengah masyarakat, MUI punya peran luar biasa.

MUI seperti salah satu dinas tertentu di pemerintah provinsi. Kita diposisikan betapa pentingnya. Ada keputusan tertentu, baik politik maupun ekonomi, pasti MUI dilibatkan. Rasanya belum valid jika tak melibatkan MUI. Ini berkat Kiai Ma'ruf sebagai Ketum. Sampai bawah, kita rasakan. Mungkin karena kita ayomi semua ormas, di tengah-tengah ada NU dan Muhammadiyah. Keberadaan MUI di masyarakat luar biasa. Sampai-sampai sebagai Rektor IAIN Ternate, saya lebih dikenal sebagai Ketua Umum MUI Maluku Utara.

Usai dilantik nanti sebagai Wapres, bagaimana kelanjutan kiprah Kiai Ma'ruf di MUI?

Kami menangkap aspirasi, khususnya di Indonesia timur, agar tidak ada sekat. Mereka menghendaki Kiai Ma'ruf ketika jadi orang nomor dua di Republik ini, dia harus menggandengkan kepemimpinan keulamaan itu. Bukan soal sibuk atau tidak. Manajemen itu bisa diatur. Keberadaan beliau sebagai ulama, jika menggandengkan posisi Wapres ini, tentu luar biasa. Kami menghendaki beliau memimpin MUI kembali. Hal-hal yang sifatnya teknis, bisa dibicarakan.

Ke depan apa yang menjadi tentangan MUI dan umat?

Utamanya persoalan ekonomi. Ini yang saya lalukan juga, baik sebagai Rektor atau Ketum MUI Malut. Saya gandengkan kegiatan MUI dengan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi. Kami prihatin dengan petani, secara

kultural berada pada posisi tidak *syar'i*. Mereka dikeroyok pengusaha-pengusaha Cina. Kita lemah, tak miliki manajemen proteksi petani. Kita tak boleh hanya bicara teori. Langsung berada di tengah-tengah masyarakat. Itu, kalau berbicara dakwah. Dakwah utama sekarang adalah ekonomi. Kalau kita lepas, dan umat berjalan sendiri, tidak tanggung pengusaha Cina, tengkulak besar, tidak main-main. MUI baru ke depan. Bagaimana kita tingkatkan kualitas umat.

Perlu Seleksi Ketat Jadi Pengurus MUI Pusat



KH Khairuddin Tahmid
Ketua Umum MUI Lampung

Tanggapan Anda terkait capaian KH Ma'ruf memimpin MUI?

Tanggung jawab MUI ada dua, yaitu *masul'uliyah diniyah* dan *masuliyah wathaniyah*. Dua tanggung jawab ini sudah melampaui target yang ditetapkan. Relasi dengan umat sudah sedemikian baik, apalagi relasi dengan negara atau pemerintah. Kita lihat dari bawah

seperti itu.

Nah, cuma yang paling utama ditingkatkan ke depan, terutama umat kalangan bawah butuh informasi cepat. Jika ada problem keumatan, cepat informasinya dari MUI. Selama ini sulit. MUI belum maksimalkan media yang dimiliki. Sifatnya menunggu. Misalnya, tersedia kumpulan putusan fatwa atau jawaban keumatan yang mudah diakses, akan jauh lebih baik ke depannya.

Bagaimana melihat relasi MUI dan pemerintah?

Sebagai kelembagaan keagamaan, MUI berelasi dengan negara telah melampaui target dan hubungannya sangat kental.

Usai dilantik nanti sebagai Wapres, bagaimana kelanjutan kiprah Kiai Ma'ruf di MUI?

Memang untuk saat ini, figur yang sejuak seperti beliau masih sulit. Kesejukan, wibawa, keteladanan, dan relasinya dengan berbagai pihak agak sulit ditemukan di sosok tokoh lainnya. Kalau problem yang bersifat aturan, bahwa pengurus MUI tak boleh rangkap jabatan di pemerintahan, saya kira kalau disepakati, kan ada forum Rakernas dan Munas, saya kira bisa dibicarakan. Sosok beliau masih dibutuhkan keteladanannya, pikirannya yang menyempulkan. Saya kira tak akan mengganggu sebagai Wapres, dan kawan-kawan Lampung punya keinginan seperti itu.

Apa harapan untuk MUI kedepan?

Di periode depan, betul-betul harus ada sterilisasi figur yang masuk MUI Pusat. Jangan sampai *khariqul 'adah*, seperti misalnya melakukan kritik masukan terhadap negara dengan cara kasar. Masih ada sosok MUI seperti itu. Makanya ke depan tak boleh seperti itu. Rekrutmen pengurus MUI Pusat harus selektif

memilih kualifikasi orang jadi pengurus MUI Pusat. Karena MUI harus *shadiqul hukumah*, bukan kritik tanpa aturan, bisa *backup* positif untuk bangsa dan negara. Dan rekrutmen harus diperketat.

Seperti Rel Kereta Api, Pemerintah-MUI Seiring Seirama



KH Saiful Islam Al Payage
Ketua Umum MUI Papua

Tanggapan terkait capaian KH Ma'ruf memimpin MUI?

Pertama, saya mengucapkan selamat kepada Ketua Umum MUI, dalam sejarah MUI bisa jadi orang nomor dua di Indonesia. Kedua, memang kepemimpinan Kiai Ma'ruf terlihat berhasil mengelola organisasi baik pusat maupun daerah. Program-programnya setiap komisi alhamdulillah saya lihat berjalan baik. Saya lihat beliau memberikan kewenangan komisi yang ada untuk melakukan kegiatan. Ini sesuatu yang luar biasa.

Ketiga, saya kagum dengan Kiai Ma'ruf karena punya konsep ekonomi keumatan, beliau pencetus bahwa umat Islam harus bisa maju dalam ekonominya. Ini harapan kita semua, sehingga konsep beliau adalah *li khidmat al-ummah* beliau ganti dengan *li khidmat at-tijarah*. Keempat, beliau banyak mengembangkan konsep segala bidang. Bidang politik, beliau buktikan jadi Wapres, beliau dorong bidang ekonomi dan tentu peran bidang budaya.

Kelima, beliau tokoh yang sangat plural. Konsep-konsep sangat diharapkan dalam konteks keindonesiaan, yaitu Islam *rahmatan lil 'alamin*. Sebagai Rais Aam Nahdlatul Ulama, manhajnya sangat pas memimpin MUI, yang barang tentu di dalamnya ada temen yang halus, agak sedang, ada yang keras, tapi beliau bisa satukan.

Yang terakhir, saya harapkan beliau jangan mundur dari MUI. Beliau walau jadi Wapres, beliau tetap pimpin MUI. Semoga beliau bisa perhatikan sekretariat yang ada di MUI seluruh Indonesia. Kita kesulitan kesekretariatan. Semoga bisa berikan.

Bagaimana Anda melihat pola ideal relasi MUI dan pemerintah ke depan?

MUI harus berkomunikasi dan bekerjasama dengan pemerintah karena satu yang penting, yaitu memberikan masukan langkah-langkah pemerintah. Semoga kerjasama MUI dan pemerintah bisa memberi kontribusi besar dalam pembangunan bangsa, baik masalah sosial, politik, keamanan, dan sebagainya. Saya harap MUI bukan hanya pemadam kebakaran, melainkan partner seperti rel kereta api, seirima dan seiring. Pandangan keumatan MUI, lebih bagusnya bisa diperhatikan pemerintah.

Kedua, tidak bisa tidak, pemerintah harus kerjasama dengan MUI karena perwakilan ormas-ormas yang ada di dalamnya. Kita memahami Indonesia adalah mayoritas umat Islam, jika umat Islamnya tidak dirangkul, tidak diper-

hatikan, barang tentu negara ini bisa goyang. Perlu kerjasama erat, bisa sinergi dengan pemerintah. Ketiga, MUI bukan alat kekuasaan. Itu perlu dipahami juga. MUI *independent* tapi tetap bisa memberi pandangan. Agar langkah pemerintah sesuai pandangan ulama.

Arus Baru Ekonomi Mulai Berkembang



Prof Dr KH Ahmad Daro'ji
Ketua Umum MUI Jawa Tengah

Tanggapan terkait capaian KH Ma'ruf memimpin MUI?

Banyak positifnya. Banyak undang-undang bernuansa keislaman. DSN tidak lepas dari beliau. Banyak regulasi diwarnai keagamaan. Kedua, arus baru ekonomi sekarang mulai berkembang. Semuanya mengarah ke situ. Ke depan, tinggal majukan lagi. Fondasi arus baru itu implementasinya terwujud. Kedekatan beliau dengan Presiden bagus. Ada bank wakaf mikro. Redistribusi aset juga berlangsung.

Akan lebih bagus lagi setelah beliau menjabat Wapres. Selain lima fungsi MUI yang ada, tetapi sama pemerintah bersahabat. Ke depan punya harapan banyak, tinggal kita bisa mewarnai atau tidak.

Usai dilantik sebagai Wapres, bagaimana kelanjutan kiprah Kiai Ma'ruf di MUI?

Rakernas bisa 'memanfaatkan' Wapres mewarnai gagasan. Itu diharapkan umat, khususnya bidang ekonomi. Tentu saja juga pendidikan, lebih bagus. Diharapkan beliau masih memimpin kita. Sudah ada yang melemparkan ide, beliau masih menjadi Ketua MUI, untuk dipertimbangkan. Atau, beliau masih di MUI, meski tidak menjadi Ketua Umum, untuk mendukung program yang kita canangkan.

Bagaimana melihat pola ideal relasi MUI dan pemerintah kedepan?

Selama ini sudah bagus dalam berbagai aspek berbangsa dan bernegara, mendukung empat pilar, sudah berlangsung. MUI berada di depan, menghadapi radikalisme, terorisme. Itu pekerjaan rumah juga buat pemerintah. Pemerintah terbantuan dengan adanya MUI. Aspek lain juga mereka diuntungkan. Kita akan lanjutkan ke depannya. Star kita apa? Beliau tidak lepas sama sekali dari MUI.

Kami Minta Beliau Tetap di MUI

KH Abdul Kadir Makarim
Ketua Umum MUI Nusa Tenggara Timur

Tanggapan terkait capaian KH Ma'ruf memimpin MUI?

Kalau dihitung pengabdian selama di MUI pusat, sudah cukup berbakti. Sampai dengan saat ini, dibentuk Pinbas-Pinbas MUI, ada bank-bank syariah, hasil karya beliau. Beliau bisa jadi Wapres, ini prestasi bagi MUI.

Bagaimana Anda melihat pola ideal relasi MUI dan pemerintah ke depan?

Saling bersinergi. Dalam hal ini Jokowi bisa ambil sebagai Wapres. Beliau dipercaya, kita harapkan ada dampaknya untuk MUI seluruh Indonesia. Makanya dengan adanya Wapres sinergitas bisa makin ditingkat.

Usai dilantik nanti sebagai Wapres, bagaimana kelanjutan kiprah Kiai Ma'ruf di MUI?

Kita harapkan begitu (masih di MUI), minimal duduk di Dewan Pertimbangan MUI. Begitu besar kontribusi dan capaian beliau di MUI, kalau lepas dari MUI tidak bijaksana. Kami minta beliau tetap berada di MUI, ya minimal di Dewan Penasehat. ■



Wawancara

Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan MUI Pusat

KIAI MA'RUF SABAR MENDENGAR, DAN ITU KEKUATAN BELIAU



Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI sebagai bagian dari agenda tata kelola organisasi, tak lepas dari kepemimpinan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan MUI Pusat, Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag. Untuk mendalami dinamika keorganisasian MUI, wartawan Mimbar Ulama, Elvi Hudhriyah, mewawancarai Buya Anwar, doktor bidang ekonomi Islam lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. Wawancara berlangsung 30 September 2019 lalu di Kantor MUI, Jl. Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Berikut petikannya:

Rakernas MUI 2019 di Lombok ini merupakan Rakernas terakhir pada kepemimpinan MUI periode ini. Apa nilai strategis?

Kita sudah empat tahun menjalankan amanat dari Munas 2015. Rakernas kali ini kita fokuskan untuk melihat amanat mana yang sudah tercapai dan amanat mana yang belum tercapai. Masing-masing komisi kita harapkan bisa menilai program mana terkait amanat Munas yang sudah terlaksana dan mana yang belum.

Rakernas ini menjadi sangat penting karena kita bisa mengevaluasi dan merancang program-program yang akan kita laksanakan sebagai program pamungkas untuk menuntaskan amanat dari Munas tahun 2015. Arti strategisnya di situ.

Sebab pada Munas tahun 2020, kepemimpinan periode ini harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Kita berharap, seluruh yang diamanatkan oleh Munas bisa terlaksana.

Apa seluruh amanat Munas itu saat ini sudah tercapai?

Pada garis besarnya sudah tercapai. Sudah mendekati tercapai. Tapi masih ada beberapa yang belum. Misalkan peta dakwah. Itu belum, masih jauh. Masih banyak yang lainnya. Masing-masing komisi

yang lebih tahu.

Apa hambatan amanat yang belum tercapai?

Kalau dulu, banyak kendalanya. Misalnya, sarana prasarana tidak mendukung atau pendanaan tidak memadai. Tapi itu sudah kita cari-cari solusinya. Kendala sarana prasarana sudah kita atasi meskipun belum sesuai yang diharapkan. Masing-masing komisi ingin punya ruangan khusus, sudah kita buat, tetapi ukurannya masih kecil. Ingin punya komputer, sudah kita sediakan. Dana sudah kita tingkatkan. Baik dari APBN maupun non-APBN.

Kabarnya, ada komisi yang belum memanfaatkan anggaran.

Bukan berarti mereka tidak melaksanakan aktivitas. Seperti komisi dakwah, saya lihat dana dia belum terpakai, karena dia bisa menggali dana dari sumber lain. Sehingga dananya surplus. Diadakan acara, surplus lagi. Sehingga dana dia sendiri tidak banyak terpakai.

Semestinya komisi lain seperti itu?

Ya semestinya. Namun tidak mudah. Bergantung pada masing-masing pimpinan komisi dan pengurus. Pak Cholil Nafis (Ketua Komisi Dakwah) itu relasinya banyak, sehingga lebih mudah mengumpulkan dana.



Momen saat Wawancara bersama Anwar Ab

Tidak semua irama komisi sama. Bagaimana menangani komisi yang aktivitasnya tidak terlalu menonjol?

Makanya, lewat ISO 9001:2015 ini kita bisa memantau. Program kerja mana saja yang sudah dilaksanakan dan mana saja yang belum dilaksanakan. Lewat ISO kita bisa petakan. Di ISO ada catatan-catatan yang dimerahi yang belum dilaksanakan. Kita sebagai pimpinan bisa menegur, apa masalahnya, kenapa ini kok belum terlaksana, sehingga ada improvement.

Empat tahun berjalan, capaian apa saja selama kepem-



bas

mpinan KH. Ma'ruf Amin?

Bagi saya, pertama soliditas. Sosok Kiai Ma'ruf itu sosok yang bisa menggerakkan orang. Pada periode ini, yang juga perlu saya garisbawahi adalah pembagian kerja. Masing-masing orang bekerja di bidangnya dan di tempat yang dia ditugaskan. Diantaranya adalah korwil-korwil, koordinator wilayah.

Kalau ada masalah di suatu wilayah, yang turun korwilnya. Jadi masing-masing pengurus itu bergerak. Ada korwil, ada sekretaris korwil. Korwil dari jajaran ketua, sekretaris korwil dari jajaran kesekjenan. Dengan demikian, tidak ada ketua

yang menganggur. Tidak ada wakil sekjen yang menganggur. Semuanya bekerja.

Untuk skala nasional dan internasional, apa yang dicapai?

Kalau kesimpulan pengamat, baik dalam maupun luar negeri, peran MUI semakin menguat. Banyak sekali undang-undang di negeri ini yang dipengaruhi MUI. Itu hal yang patut kita syukuri. Dan kita yakin, apa yang diperjuangkan MUI itu tidak hanya memberi manfaat bagi umat Islam, namun juga bagi umat-umat agama lain. Bagi alam semesta. Karena ajaran Islam itu tidak hanya baik un-

tuk orang Islam tapi juga baik untuk orang beragama lain. Kesimpulannya, konsep dan pemikiran yang diperjuangkan MUI melalui undang-undang itu tidak merugikan orang lain, meskipun mereka tidak seiman dengan MUI.

Gejolak dunia Islam juga menjadi sorotan MUI?

Pada periode ini kita pernah mengadakan acara dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Jutaan orang berhimpun di Monas. Saya kira belum ada aksi serupa di dunia yang sebesar itu. Itu dimotori MUI. Ada peran Kiai Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum. Dan beliau tampil sebagai pembicara di tempat itu. Itu beritanya betul-betul mendunia. Saya punya teman dari Maroko, dia mendapatkan cuplikan gambar dan dia kirimkan ke saya menandakan sukacita dan gembiranya bahwa umat Islam Indonesia yang dimotori MUI bisa memberikan dukungan yang luar biasa kepada perjuangan rakyat Palestina.

Tantangan lain ke depan adalah diberlakukannya UU Jaminan Produk Halal secara mandatory. Bagaimana MUI mengantisipasi?

Tugas MUI mengakreditasi lembaga pemeriksa halal (LPH), memberikan sertifikat auditor, kemudian mengeluarkan fatwa. MUI tidak berat

lagi tugasnya. Yang mengaudit adalah LPH. Pertama, tugas MUI adalah menilai apakah LPH itu layak atau tidak secara syar'i. Kalau layak, berarti dia sudah bisa melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pemeriksa halal. Kalau mereka bekerja, nanti hasil kerjanya diserahkan kepada MUI untuk dinilai apakah produknya syar'i atau tidak.

MUI sudah mengantisipasi itu dengan mendirikan Dewan Halal Nasional Indonesia. Kita sedang membentuk tim untuk menyiapkan segalanya, untuk membentuk dewan halal itu, diketuai oleh Bapak Zainut Tauhid Sa'adi, Wakil Ketua Umum.

Bagaimana Anda melihat kepemimpinan Kiai Ma'ruf selama ini?

Bagi saya, apa yang sudah dikerjakan Kiai Ma'ruf, yang baik-baik bisa dilanjutkan. Dan bagi saya, yang paling terasa adalah soliditas. kebersamaan. Tidak mudah membuat kepemimpinan yang kompak dan solid. Dan kita harus belajar kepada Kiai Ma'ruf Amin.

Kematangan beliau. Salah satu yang saya tidak sanggup meniru adalah daya tahan beliau untuk mendengar pandangan dan pikiran orang. Saya sendiri kadang-kadang juga tidak tahan itu. Beliau sanggup mendengar dan itu ternyata kekuatan beliau.



Kesempatan Anwar Abbas sebagai Narasumber

Jadi, pemimpin itu adalah dia yang juga mampu mendengar. Memiliki kemampuan mendengar yang tinggi. Salah satu yang menjadi pelajaran adalah kemampuan beliau untuk sabar mendengar.

Harapan untuk Rakernas 2019?

Sebuah kepemimpinan itu baik atau tidak, bila dikelola dengan baik. Kita tidak hanya berorientasi pada hasil, namun juga pada proses. Untuk itu, kita membenahi manajemen MUI dengan melaksanakan ISO. Sebab dengan ISO, segalanya serba terukur.

Apa yang akan kita kerjakan itu kita tulis. Lalu yang kita tulis itu kita kerjakan. Nanti kita nilai sudah dikerjakan atau belum. Seumpama sudah, sudah seberapa besar pencapaiannya. Jadi serba terukur. Tapi ISO ini kan baru. Mungkin ke depan ada ISO lain lagi. MUI periode ini dari sisi sarana prasarana sudah tertata rapi.

Terkait anggaran, bantuan APBN mencukupi?

Menurut Kiai Ma'ruf, masih jauh. Kiai MA'ruf menghitung diperlukan dana 30 Milyar setahun. Dari APBN selama ini baru enam milyar. Namun



indonesiainside.id

dalam dua tahun terakhir, sudah naik menjadi sepuluh atau dua belas milyar. Kalau kita membutuhkan 30 Milyar, maka baru sepertiga. Mudah-mudahan nanti setelah Kiai M'aruf menjadi wapres bisa ditingkatkan.

Dan program yang tersisa adalah, bagaimana MUI seluruh Indonesia menjadi satu kesatuan. Nanti ada rapat-rapat dengan MUI Daerah yang tanpa datang ke Jakarta, melalui teleconference. Jadi, saudara kita di Aceh, Papua, Kalimantan Selatan, bisa menggunakan teleconference. MUI menjadi modern yang

efisien dan efektif. Itu jauh lebih murah bila kita rapat memakai teleconference.

Tahun depan ada Munas untuk memilih Ketum MUI. Selama ini yang terpilih adalah tokoh dari dalam pengurus MUI. Apakah memungkinkan, tokoh dari luar pengurus MUI menjadi Ketua Umum MUI?

Asal dia beragama Islam, warga negara Indonesia, dan dipercaya peserta Munas, saya kira bisa. Harus diketahui, yang beraktivitas di MUI itu ada tiga unsur, yaitu ulama, zuama, dan cendekiawan muslim. Tiga elemen ini harus hadir dan harus tampak dalam kepemimpinan yang akan datang. Dan karena ini Majelis Ulama, tentu harus dipimpin oleh seorang ulama. Yang tidak ulama sebaiknya sadar diri saja dulu. Karena ini namanya Majelis Ulama.

Apa sekarang sudah ada gambaran sosok yang akan menjadi Ketua Umum MUI di 2020 nanti?

Tidak. Ulama di negeri ini banyak. Apalagi di Nadhlatul Ulama, isinya ulama semua. Cuma pertanyaannya adalah mencari sosok ulama yang disepakati, yang diusung untuk menjadi pengurus MUI itu yang perlu dimusyawarahkan.

Ada banyak pertimbangan?

Ya. Saya terus terang terpengaruh pemikiran almarhum Bapak Slamet Effendy Yusuf (mantan Wakil Ketua Umum MUI). Kata beliau, kita di dunia ini umat yang besar. Salah satu yang terbesar. Namun kita tidak kompak, kurang bersatu. Kita selama ini pandai hitung-hitungan kali, tambah dan kurang, namun lemah dalam bagi membagi.

Oleh karena itu, nanti yang menjadi salah satu perhatian dalam pemilihan pengurus MUI adalah representasi atau keterwakilan ormas-ormas Islam. Di Indonesia ini tidak hanya ada NU dan Muhammadiyah. Tapi juga ada ormas lain seperti Alwashliyah, Alitihadiyah, PERSIS, PUI, Tarbiyah, Perti, DAN macam-macam.

Kita mengharapkan itu ada representasi. Kalau tidak tertampung di dewan pimpinan, minimal tertampung di pengurus komisi. Kedua, prinsip kompetensi. Selain dia mewakili ormas-ormas Islam yang ada atau elemen masyarakat seperti perguruan tinggi, dia juga harus memiliki kompetensi. Apakah kompetensi sebagai ulama, zuama, atau cendekiawan muslim. Tiga itulah yang menjadi patokan dalam kita memilih kepengurusan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa terpilih dan tersaring dengan baik yang mampu membawa wajah MUI ke depan. ■

TANTANGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH MENGGELUTI ERA EKONOMI DIGITAL

Prof Dr KH Ma'ruf Amin

Ketua Umum MUI/Ketua Dewan Syariah Nasional



Prof Dr KH Ma'ruf Amin Membuka Secara Resmi Ijtima' Sanawi 2019

dsnmui.or.id

Saya bersyukur, acara Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) tahun 2019 kembali bisa diselenggarakan. Kali ini di Bogor. Acara Ijtima' ini mempunyai arti penting untuk perkembangan ekonomi syaria-

h di Indonesia. DPS mempunyai peran signifikan dalam memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan dan bisnis Syariah. Peningkatan kompetensi para DPS terhadap fatwa, regulasi dan operasional Lembaga

Keuangan Syariah (LKS) atau Lembaga Bisnis Syariah (LBS) menjadi hal yang tidak bisa terelakkan. Ijtima sanawi diharapkan dapat menjadi salah satu forum untuk melaksanakan hal itu.

Misi utama dibentuknya De-

wan Syariah Nasional (DSN) MUI adalah untuk memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Terkait dengan hal itu, DSN-MUI mendorong keterlibatan para ulama untuk ikut berperan dalam mewujudkan misi tersebut. Di antara peran yang bisa dilakukan adalah dalam hal perumusan fatwa dan pengawasan penerapannya di Industri LKS dan LBS. Fatwa DSN-MUI merupakan unsur penting dalam perumusan peraturan perundang-undangan terkait ekonomi Syariah di Indonesia. Fatwa DSN-MUI juga menjadi pedoman dan acuan operasional LKS dan LBS.

Selain itu, para ulama juga didorong agar terlibat dalam pengawasan kepatuhan penerapan fatwa di LKS/LBS. Melalui DPS, fungsi pengawasan tersebut dilakukan. Oleh karena itu, DPS harus memiliki “amunisi” yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan peran tersebut. Selain harus berakhlak mulia dan berintegritas, DPS juga harus memiliki:

a. Keilmuan kesyariahan yang mumpuni, khususnya *fiqh muamalah*, dan lebih khusus lagi pemahaman yang paripurna atas fatwa DSN-MUI. Hal itu diperlukan karena merupakan *core competency* tugas DPS. Tugas utama DPS adalah mengawasi kepatuhan prinsip Syariah dan penerapan fatwa MUI di LKS/LBS.

b. Pemahaman atas pera-



Salah Satu Acara pada Ijtima' Sanawi 2019

dsnmui.or.id

turan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan bidang tugasnya. Misalnya DPS yang bertugas di perbankan Syariah, harus tuntut dan faham terhadap UU tentang Perbankan Syariah, Peraturan OJK, Peraturan BI, dsb.

c. Memiliki komitmen untuk menumbuhkembangkan ekonomi syariah di tanah air.

Acara Ijtima Sanawi mempunyai arti penting selain untuk meningkatkan kompetensi DPS, juga untuk menciptakan soliditas para DPS dalam menjalankan tugas dan perannya. Ke depan, tantangan untuk itu tidaklah ringan. Hal itu setidaknya disebabkan:

o Ekonomi nasional secara umum sedang mengalami kondisi tertekan. Sebagaimana ekonomi global juga mengalami hal yang serupa. DPS

dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari jalan keluar (*makharij*) terhadap permasalahan yang dihadapi LKS/LBS. DPS dituntut untuk mampu merumuskan inovasi produk yang bukan hanya market friendly, tapi juga benar-benar sesuai dengan prinsip Syariah.

Semangat untuk mencari *makharij* ini harus dikedepankan, dibanding semangat untuk membatasi dan apalagi melarang. Selagi masih dalam lingkup prinsip kesyariahan dan fatwa DSN-MUI, para DPS sedapat mungkin memilih jalur *at-taysir al-manhajy*, yaitu jalan meringankan yang masih dalam lingkup manhaj yang ada.

o Perkembangan Teknologi Informasi akan mengubah secara mendasar praktik ekonomi. Hal itu akan mendorong semakin berkembangnya Revolusi Industri yang

berdampak pada digitalisasi banyak hal. *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI) tidak hanya menciptakan peradaban baru, namun juga mengoptimalkan apa yang sudah ada dan menghubungkan satu dengan lainnya (*inter-connected*).

Revolusi digital telah mengubah strategi dan konsep berbagai industri, termasuk industri Ekonomi dan Keuangan, terutama dalam mendorong “*revenue stream*” baru untuk meningkatkan performa kinerja masing-masing perusahaan dan industri.

Revolusi digital akan berdampak besar bagi industri. Siapa yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan “*melek*” digital dan teknologi, maka akan terlindas. Banyak pelaku industri yang terbelalak dengan dampak revolusi digital tersebut. Misalnya dengan adanya pola perusahaan keuangan semacam *shadow banking*, *Angel Investor* dan model bisnis baru yang mengembangkan *crowd funding* serta pola bisnis *Peer to Peer Lending*.

Menghadapi semakin berkembangnya digital ekonomi dan keuangan seperti itu para DPS dituntut untuk mampu memahami dan menyesuaikan diri. Oleh karena itu, ke depan DSN-MUI akan semakin intensif berkoordinasi dengan Lembaga regulator untuk menyambut era baru ekonomi tersebut. DSN-MUI juga akan



Foto Bersama Dewan Pimpinan DSN MUI

dsnmui.or.id

mempersiapkan kebijakan terkait dengan *upgrading* kompetensi DPS dalam menjalankan tugasnya di era ekonomi digital tersebut.

DSN-MUI telah menyiapkan diri untuk menyambut datangnya tren ekonomi digital. Fatwa terkait dengan hal itu sudah ada yang ditetapkan dan masih ada beberapa yang sedang dikaji dan disiapkan untuk ditetapkan. Terus terang, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi DSN-MUI.

Praktik ekonomi digital tersebut berbeda sama sekali dengan praktek ekonomi di era sebelumnya, terutama era ketika kitab fikih ditulis. Bab ekonomi yang tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik banyak yang tidak *aplikable* saat ini. Oleh sebab itu, DSN-MUI dalam menetapkan fatwa dituntut untuk melakukan serangkaian

upaya sungguh-sungguh (*ijtihad*) dalam menjawab persoalan ekonomi yang muncul saat ini, termasuk ekonomi digital.

Dalam menetapkan fatwa, DSN sedapat mungkin memberikan jalan keluar (*makharij fiqhiyah*). Yaitu dengan tetap menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip ekonomi. DSN senantiasa menjaga karakter asasi fikih, yakni fleksibilitas (*murunah al-fiqh al-islamiy*) dan tidak memberatkan (*adam al-haraj*). Karakter fikih yang demikian sangat mungkin untuk dijadikan alat untuk merespons perkembangan trend ekonomi yang saat ini berlaku. Sehingga tugas DSN-MUI untuk mensyariatkan ekonomi masyarakat dan memasyarakatkan ekonomi Syariah dapat berjalan dengan baik. ■

Hadapi Disrupsi Informasi

Komisi Infokom MUI Gelar Rakornas



mui.or.id

Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (Infokom MUI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) selama tiga hari mulai Senin (17/07) sampai Rabu (17/07) di Jakarta. Rakornas tersebut dalam rangka menyongsong perkembangan teknologi yang ditandai adanya disrupsi dalam bidang informasi dan komunikasi. Rakornasitu, juga bertujuan melaksanakan konsolidasi komisi informasi dan komunikasi MUI se-Indonesia.

Ketua MUI Bidang Infokom, KH. Masduki Baidlowi mengungkapkan, berkembangnya konten-konten di media sosial yang sekarang berefek pada model komunikasi yang ada. Perkembangan tersebut, katanya, tidak berjalan seimbang dengan kualitas pengguna informasi di dalamnya. Untuk itu, kata dia, Rakornas ini bertujuan merumuskan model agar bagaimana perkembangan teknologi dan informasi ini tidak berdampak buruk.



Pembukaan Rakornas Komisi Infokom MUI

Rakornas ini, kata dia, juga bertujuan menyamakan persepsi antara MUI Pusat dengan MUI daerah khususnya dalam bidang infokom. Selain itu, Rakornas ini juga untuk mengkoordinasikan informasi dan komunikasi dengan komisi lain di lingkup MUI Pusat.

“Harapannya ke depan, sinergi antarlembaga dan badan di MUI Pusat bisa terlaksana dengan baik sehingga fungsi infokom bisa berjalan lebih optimal, semikian juga dengan komisi yang lain,” paparnya Selasa (16/07), di Hotel Grand Cempaka, Jakarta.

Kiai Masduki menilai pertemuan ini penting karena inti dari sebuah organisasi adalah informasi dan komunikasi. Jalinan komunikasi yang lancar di dalam organisasi akan

memudahkan proses organisasi di dalamnya. Selama ini, papar Kiai Masduki, masalah dalam organisasi adalah tidak sinkronnya informasi antara pusat-daerah.

“Pertemuan ini penting karena kita punya jaringan di situ,” katanya. Menteri Informasi dan Komunikasi (Kominfo) Rudiantara yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan bahwa peran MUI di bidang informasi dan komunikasi akan sangat besar dan terus bertambah besar karena dunia semakin dalam memasukinya era digital.

“Era informasi yang berada di dunia digital itu sangat luar biasa, saya berterimakasih kepada MUI yang telah mengeluarkan fatwa bagaimana umat Islam bermedia sosial, fatwa tersebut dikeluarkan tahun



mui.or.id

2017,” imbuhnya.

Dalam Rakornas selama tiga hari ini, Komisi Infokom MUI juga mengadakan kegiatan Anugerah Syiar Ramadhan 2019 pada hari pertama. Pada hari kedua, kegiatan diisi dengan seminar dan sidang-sidang pleno yang terbagi dalam beberapa komisi. Sementara pada hari terakhir, kegiatan rencananya akan ditutup oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

Menkominfo Cerita Lika-Liku Penanganan Hoaks

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara memaparkan perjalanannya menangkal *hoaks* selama ini. Dia mengungkapkan bahwa perjalanan menangani konten *hoaks* setidaknya melalui tiga bagian penting dan yang pertama adalah pada bagian hulu. Pada bagian ini, pemerintah dalam hal ini Kominfo menyelenggarakan program literasi media sosial.

“Karena bagaimanapun kita harus meningkatkan lit-



Menkominfo Menyampaikan Paparan

mui.or.id

erasi, masyarakat harus mengetahui bagaimana merespon media sosial, literasi ini membutuhkan biaya yang cukup besar, membutuhkan waktu yang panjang,” katanya saat mengisi salah satu sesi Rakornas Komisi Infokom MUI Seluruh Indonesia di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Selasa (16/07).

Selain itu, kata dia, Kominfo juga telah mengadakan sebuah program bernama *Cyber Kreasi*. Pihak-pihak yang terlibat dalam *Cyber Kreasi* ini bermacam-macam. Mulai dari pemerintah, ormas, artis, dan sejenisnya.

Setelah itu, program di tengah, Kominfo beberapa kali melakukan penutupan



Peserta Rakornas foto bersama Menkominfo

mui.or.id

akun atau pemblokiran terhadap situs-situs tertentu. Pada saat pertama kali melakukan pemblokiran itu pada tahun 2015, ungkapnya, banyak pihak yang melakukan protes. Saat itu, kata dia, Kominfo

mendapatkan rekomendasi dari BNPT agar beberapa situs tersebut ditutup.

Proses pemblokiran tersebut memang tidak mudah. Beberapa pihak banyak yang melakukan protes terkait pemblokiran seperti itu. Proses pemblokiran juga kerap memakan waktu bila harus melalui kajian mendalam dan dibawa ke panel. Belum selesai panel membahas temuan, konten-konten tersebut sudah menyebar kemana-mana.

“Jadi terkadang kami membeberanikan diri untuk menutup terlebih dahulu, namun kami tetap memberi ruang untuk menyampaikan bahwa yang kami lakukan itu tidak benar,” paparnya.

Belakangan ini, kata dia, kasus yang ramai di dunia maya dan banyak merugikan banyak pihak adalah menjamurnya *peer to peer lending*. Layanan jasa pemberian pinjaman *online* ini ternyata ban-



Seminar Peran Ulama Menghadapi Disrupsi Informasi

mui.or.id

yang tidak sesuai aturan dan merugikan banyak orang.

Proses yang diajukan korban dalam melaporkan biasanya rumit. Mereka harus melaporkan dulu ke OJK, kemudian OJK melaporkan ke Kominfo, dan Kominfo kemudian menutup. Bila proses lama itu dijalankan, ungkapnya, maka penyedia peer to peer lending tadi semakin menelan banyak korban.

“Saya mengikuti manfaatnya mudharatnya, untuk umat Muslim, maka tiap hari kita melakukan tutup. Dan alhamdulillah benar semua. Ini yang Kominfo selalu lakukan,” kata dia.

Langkah ketiga yang dilakukan oleh Kominfo dalam menanggulangi *hoaks* adalah dengan menegakkan hukum berdasarkan peraturan yang

berlaku. “Pemerintah melakukan penegakan hukum, harus ada penegakan hukum, harus ada efek jera, kalau tidak efek jera, maka masyarakat mengatakan ah tidak jadi masalah,” katanya.

Dari semua langkah itu, Menkominfo memaparkan, jalan terbaik untuk menangani *hoaks* sebetulnya adalah dengan jalur struktural. Dia mencontohkan kasus yang terjadi pada negara-negara maju. Norwegia misalnya, meskipun tidak terbebas dari berita *hoaks*, namun masyarakat tidak memperlakukan hal itu. Sebab, kata dia, sejak SD anak-anak di Norwegia sudah diajarkan bagaimana seorang anak merespon sebuah informasi.

“Jadi sejak kecil secara struktural, kami berharap

suatu saat di sini juga menjadi struktural, kita harus mendorong silabus bagaimana merespon atau mencerna informasi sejak di sekolah atau kalau bisa di sekolah dasar,” paparnya.

Hasil Rakornas Bidang Infokom MUI

Rakornas Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (Infokom MUI) se-Indonesia secara resmi ditutup oleh Menteri Agama Rabu (17/07) siang. Ketua Komisi Infokom MUI, Asrori S. Karni mengungkapkan, selama tiga hari ini peserta menjalani dua kegiatan utama.

Pertama, kata dia, peserta Rakornas belajar dari pengalaman komisi dan lembaga di internal MUI dalam melaksanakan konsolidasi komunikasi dalam merespon disrupsi. Dalam hal ini, Komisi Infokom MUI menggandeng LPPOM MUI, Komisi Fatwa, Komisi Dakwah, serta simulasi aplikasi *Webinar Zoom* dari DSN MUI agar bisa berkoordinasi dengan jarak jauh.

Dalam upaya tersebut, dia menyampaikan, Komisi Infokom juga melakukan kerjasama dengan lembaga mitra luar seperti Pegadaian Syariah terkait Industri berbasis IT, Kemenkominfo tentang tantangan media informasi dan komunikasi terkini, serta Kemenag tentang moderasi beragama.

“Pengayaan materi ada *lesson learned* yang berasal dari DSN, LPPOM MUI, Komisi Fatwa, dan Komisi Dakwah. Lalu ada paparan Menkominfo, Pakar ICT, dan industri syariah berbasis IT menggandeng Pegadaian Syariah, serta orasi Menteri Agama,” paparnya, Rabu (17/07) usai penutupan Rakornasdi Hotel Grand Cepaka, Jakarta.

Selain pengayaan materi, lanjut dia, peserta Rakornas juga mengikuti sidang yang terbagi ke dalam empat komisi. Komisi satu membahas mengenai organisasi dan Jaringan, komisi dua membahas program kerja, ketiga membahas pengembangan media MUI, dan komisi terakhir membahas rekomendasi.

Dia mengatakan, pada komisi organisasi dan jaringan, Komisi Infokom MUI akan melakukan perombakan tata organisasi dan jaringan di lingkungan MUI. Lingkungan MUI tersebut mencakup lingkungan internal antara sesama komisi/lembaga di MUI Pusat dan MUI daerah atau lingkungan eksternal dengan mitra seperti pemerintah, media, maupun pihak-pihak lain pada era baru yang berciri dan berdampak disruptif. Hal ini, kata dia, untuk menegaskan peran MUI sebagai *khadimul ummah wa shadiqul hukumah* (pelayan umat dan mitra pemerintah).

“Hal kedua terkait program



Foto Bersama Peserta Rakornas dengan Sekjen MUI Pusat

mui.or.id

kerja, Komisi Infokom akan melakukan modifikasi dan upgrade program kerja, yg menekankan prinsip kolaborasi pusat-daerah, internal dan eksternal, berjejaring, dan memanfaatkan perkembangan teknologi, khususnya ICT, untuk mengoptimalkan peran ulama, khususnya menghadapi disrupsi informasi, yg di antara cirinya, mengguncang dan mengejutkan,” katanya.

Terkait pembahasan pengembangan media MUI, dia mengungkapkan pengelolaan media di Komisi Infokom MUI Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dirancang agar semakin konvergen. Media-media MUI nantinya juga akan memaksimalkan multiplatform dan mengikuti dinamika cepat ICT.

“Agar ikut membentuk iklim arus informasi dan ko-

munikasi yg sehat, sebagaimana dipandu dalam Fatwa MUI tentang Pedoman Muamalah di Media Sosial dan fatwa lain yg terkait,” paparnya.

Terakhir, terkait rekomendasi, Rakornas kali ini menghasilkan dua aspek rekomendasi yaitu dari sisi eksternal dan internal. Secara internal, Komisi Infokom akan menekankan komitmen yang kuat, konsolidasi, dan kolaborasi dengan semua bidang Infokom di semua jenjang MUI dalam menghadapi disrupsi informasi.

“Sedangkan secara eksternal, mendorong sikap proaktif untuk mendorong kerjasama, membangun mitra dengan berbagai *stake holders* seperti regulator, Kominfo, Dewan Pers, KPI, industri media massa, dan sejenisnya,” paparnya.



Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Memberi Paparan mui.or.id

Menag Tutup Rakornas Infokom MUI

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menutup rangkaian Rakornas Bidang Infokom MUI se-Indonesia yang sudah berlangsung selama tiga hari sejak Senin (15/07). Pada kesempatan tersebut, Menag kembali mengusulkan pentingnya moderasi beragama. Menag menilai langkah ini teramat penting terutama untuk merespon perkembangan dunia yang semakin cepat dan berubah.

Menag mengatakan, moderasi beragama berbeda dengan moderasi agama. Selama ini, kata dia, banyak orang salah kaprah menganggap moderasi beragama sebagai moderasi agama. Padahal, dua hal itu menurutnya adalah dua hal yang berbeda. Moderasi beragama, papar dia, adalah bagaimana memoderasi cara menjalankan atau mengamalkan agama.

“Islam datang dari dzat

Yang Maha Segala dan pasti sempurna ajarannya itu, tapi cara kita memahami agama, cara kita berislam, memahami ajaran Islam, mengamalkannya, ini yang boleh jadi kita bisa tergelincir atau bahkan terjerumus pada pengamalan yang berlebihan tadi itu yang tataruff tadi itu,” paparnya di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Rabu (17/07).

“Jadi bukan agamanya yang kita moderasi, tapi cara kita beragama itu yang harus kita jaga jalurnya pada jalur yang tidak berlebih-lebihan,” imbuhnya.

Menurut Menag, moderasi beragama ini penting karena dinamika kehidupan terus berubah sangat tinggi bahkan dari hari ke hari masalah kehidupan semakin kompleks. Dia mencontohkan, Tuhan tidak lagi menciptakan lahan dan hutan dan jumlah tanah semakin menyusut dari waktu ke waktu. Sementara itu, jumlah manusia terus bertambah. Sehingga, ungkapnya, dengan

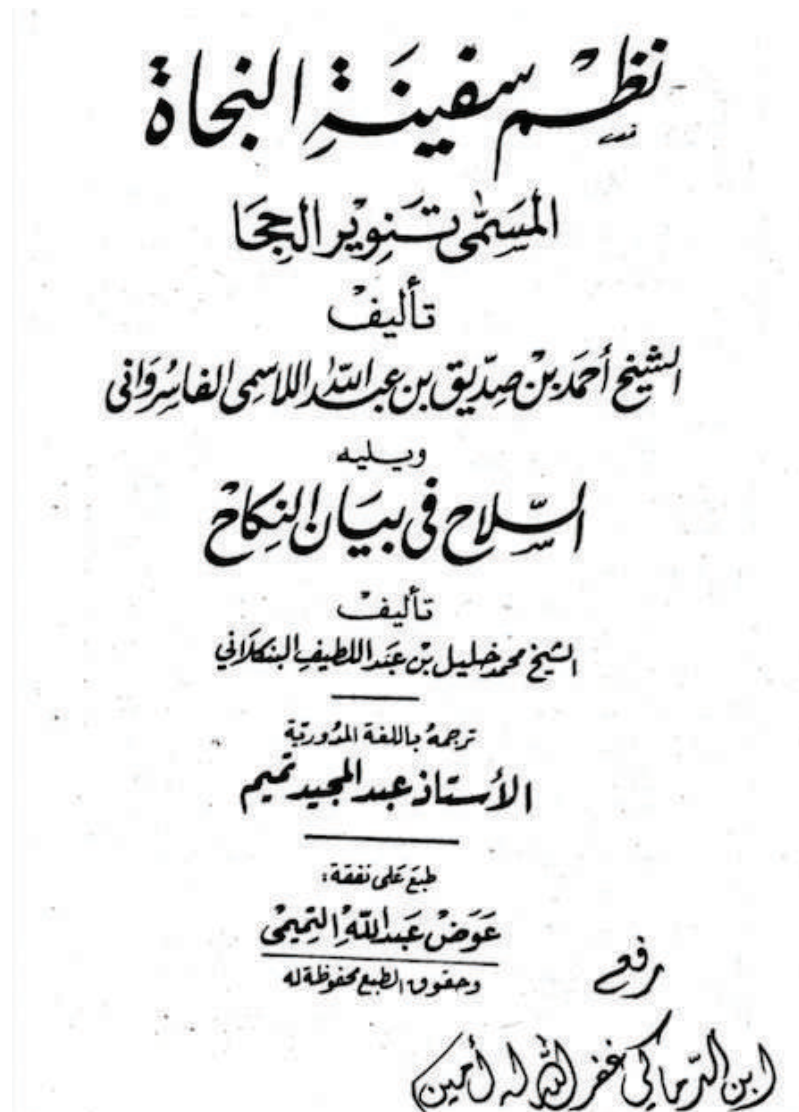
hanya mempertimbangkan variabel yang sangat sederhana ini saja, manusia akan menjalani kompetisi hidup yang luar biasa yang artinya ada perubahan.

Kementerian Agama sendiri, tutur Menag, saat ini sedang melaksanakan moderasi agama, misal, dalam hal perubahan terjemahan *al-Quran*. Dia menceritakan bahwa terjemahan *al-Quran* pertama kali muncul pada tahun 1965. Terjemahan itu kemudian mengalami revisi selama dua kali yakni pada periode 1989/1990 dan 1998/2002. Tahun ini, kata dia, terjemahan *al-Quran* akan mengalami revisi ketiga. Menag memandang revisi terjemahan itu perlu karena cara pandang manusia dalam menerjemahkan teks tersebut juga berkembang.

“Yang tidak berubah itu Alqurannya, itu tidak berubah, tapi tafsiran terhadap ayat-ayat suci itu yang berubah karena (terjemahan/tafsiran) itu buatan manusia. Ini yang harus senantiasa dimoderasi karena satu-satunya rujukan untuk mehamai nilai Islam hanya berdasarkan teks saja untuk era ini, karena kitab suci kita terdiri dari teks dan karena kita tidak lagi hidup sezaman dengan rasulullah, maka tindakan beliau pun kita ketahui hanya dari teks saja,” katanya.

■ **M. Azharun Niam dan M Fakhruddin**

Syarah Mufti Mekah atas **Kitab Ulama Jawi**



Belum pernah terjadi seorang ulama Mekah yang telah bergelar mufti mensyarah karya ulama Indonesia. Justru sebaliknya, banyak ulama Indonesia yang mensyarah karya-karya ulama Timur Tengah.



Kegiatan Para Santri saat Belajar Kitab.

gontor.ac.id

Syaikh Nawawi Banten sangat banyak karya syarahnya. Maraqil Ubudiyah adalah syarah atas karya Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Mirqatus Shu'ud wat Tashdiq syarah atas karya Sullamut Taufiq karya Sayid Abdullah Ba'alwi. Kasyifatul Saja sebagai syarah atas Safinatun Naja karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrami, dan lain sebagainya.

Pensyarah biasanya adalah generasi berikutnya yang ingin menjelaskan paparan ulama pendahulunya untuk generasi berikutnya. Atau, pensyarah biasanya menempatkan diri sebagai murid.

Tapi, dalam kasus ini men-

jadi berbeda. Sebab, Syaikh Ali bin Husein Al-Maliki Al-Makki adalah ulama menonjol di Mekah yang lahir tahun 1875. Sementara yang disyarah adalah karya ulama Indonesia yang usianya jauh lebih muda 20 tahun di bawahnya. Bisa diduga, pensyarah pasti memiliki ketertarikan atas karya itu untuk dibahas lebih jauh.

Hal ini bisa memberi makna penghargaan atas karya Indonesia yang menulis karyanya dalam bahasa Arab sepenuhnya dalam bentuk syair. Memang, termasuk langka karya syair ditulis oleh ulama yang bukan Arab, apalagi tinggal di luar Arab.

Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki adalah nama

legendaris dalam khazanah keilmuan di Mekah. Banyak pelajar Indonesia yang belajar di Mekah pada awal abad 20, akan senantiasa bertemu atau berguru dengannya. Nama itu tidak ada kaitan dengan ulama akhir abad 20 Sayid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, selain kesamaan mazhab.

Syekh Muhammad Ali adalah ulama terpandang di Mekah pada zamannya. Dua kakaknya, Syekh Muhammad bin Husain dan Syekh Abid bin Husain, adalah para pendekar fikih, khususnya fiki mazhab Maliki. Karena kepakaran itulah keluarga ini dipercaya menjadi mufti mazhab Maliki. Mula-mula yang jadi mufti ialah Syekh



Syaikh Ali bin Husein Almaliki

Syaikh Ahmad Qusyairi bin Shiddiq
Allasemi Alfasuruani

Muhammad bin Husain. Selanjutnya, posisi mufti berpindah kepada Syekh Abid. Syekh Muhammad Ali dipercaya menjadi mufti mazhab Maliki pada tahun 1921, menggantikan sang kakak.

Syekh Muhammad Ali berdarah Maroko. Ia lahir di Mekah pada tahun 1292 H, bertepatan dengan tahun 1875 M. Ia yatim sejak usia 5 tahun, setelah ditinggal wafat ayahnya, Syekh Husain bin Ibrahim Al-Maliki.

Syekh Muhammad Ali adalah ulama terkemuka Mekah pada zamannya sehingga dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram. Kelak, dua belas tahun sesudah itu ia dipercaya menjadi Syaikhul Masyayikh alias guru besar

pada perguruan Darul Ulum, sebuah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Sayyid Muhsin Al-Musawa, ulama asal Palembang.

Tak pelak lagi, Syekh Muhammad Ali adalah mahaguru bagi para ulama Arab di Mekah. Di antaranya adalah nama-nama besar berikut: Sayyid Syekh Hasan Masyath (wafat 1399 H), Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki (wafat 1391 H) dan Sayyid Muhammad Amin Kutby (wafat 1404 H).

Tak hanya itu. Hampir semua ulama Melayu yang tinggal atau merantau ke Mekah pada paruh kedua abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20 pernah berguru dan menjadi muridnya. Sayyid

Muhsin Al-Musawa (Palembang dan wafat tahun 1354 H.), Syekh Yasin Al-Fadani, KH. Syarwani Abdan (Martapura), KH. Zainuddin Abdul Majid Pancor, NTB (pendiri Nahdhatul Wathan, wafat pada 1997 H), K. Nur Ali (Bekasi), KH. Hasbiyallah (Klender, Jakarta Timur), Syekh Muda Wali Al-Khalidi (Aceh, wafat 1961 M), dan lain sebagainya.

Selain pakar di bidang fiqh, ia juga dikenal piawai dalam ilmu nahwu (gramatika bahasa Arab) sampai-sampai beliau dijuluki “Sibawaih pada zamannya”. Dan salah satu gurunya yang ulama asal Indonesia adalah Syaikh Abdul Ghani Bima.

Dilihat dari karya-karya menunjukkan bahwa ia memi-

liki keilmuan dari berbagai disiplin. Ia menulis At-Taqrîrât ‘ala Syarh al-Muhallâ, Tahdzib al-Furûq lil-Qarâfi, al-Hawâsyî as-Saniyyah ‘ala Qawânîn Ibn Jizziy al-Mâlikî, Hawâsyî ‘ala al-Asybâh wan-Nazhâ’ir lis-Suyûthî, Taqrirat ‘Ala Syarhil Khudhari ‘Ala Alfiyah Ibni Malik, Taqrirat ‘Ala Syarh Jam’il Jawami’ fin Nahwi, Tuhfatul Khallan Hasyiyah Tahdzibil Bayan, Tadributh Thullab fi Qawa’idil I’rab (2 juz), Taqrirat ‘Ala Syarh Al-Mahalli li Jam’il Jawami’ fi Ushulil Fiqh, Hasyiyah ‘Ala Kitab Ath-Thalaththuf Syarh At-Ta’arruf fi Ilmil Ushul hingga puluhan karya lainnya.

Orang Pilihan

Terkait dengan upaya pensyarahannya Syaikh Ali atas karya Syaikh Ahmad yang berjudul Tanwirul Hija, Syaikh Ali menulis: “Mengingat anak-anak Jawa sibuk menghafalnya (kitab Tanwirul Hija), dan manfaat dari kitab aslinya (Safinatun Naja) telah merata pada seluruh santri, serta penazhamnya yang utama telah meminta saya untuk mensyarahkannya (mengomentarkannya) dengan syarah yang dapat menjelaskannya pada para pemula, maka sungguh penting untuk memenuhi apa yang menjadi idamannya.”

Kitab Tanwirul Hija memang cukup populer di pesantren dan menjadi hafalan. Pondok Pesantren Hidayatul



Mubtadiin, Lirboyo, Kediri, misalnya. Untuk mata pelajaran fikih pada kelas ibtidaiyah memasukkan kitab Tanwirul Hija sebagai salah satu mata pelajaran bersama dengan kitab Fathul Qarib, Uyunu Masail an Nisa, Sullamut Taufiq dan Safinatus Shalah.

Karya itu sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa daerah di Nusantara. Di antaranya, Kiyai Haji Abdul Qadir Rozi dari Bojong Meron, Cianjur, Jawa Barat, menterjemahkannya dalam bahasa Sunda. KH Abdul Majid Tamim, Pamekasan, menerjemahkannya dalam bahasa Madura. Ahmad Asyhari Shofwan menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia.

Dalam pengantar itu ada kesan bahwa Syaikh Ali diminta untuk mensyarah karya nadzam ini. Ia menyangupi

mensyarahkannya karena karya ini telah menjadi populer dalam hafalan anak-anak santri di Jawa (Nusantara). Ia tidak menaruh gengsi dengan mensyarah karya ulama yang jauh lebih muda darinya, namun sebagai persahabatan antara dia dan Indonesia. Syaikh Ali tercatat dua kali ke Indonesia, yaitu tahun 1924 dan tahun 1926.

Tentu, Syaikh Ali melihat karya itu sebagai karya yang bagus yang layak dikomentari (syarah). Syaikh Ali juga mengagumi Syaikh Ahmad yang kelahiran lasem dan besar di Jember dan Pasuruan dan masa tua di Banyuwangi itu disebutkan sebagai Al-Alim Al-Fadhil Arrabbani yang bisa diartikan sebagai sang alim, yang unggul, dan dekat dengan Allah.

Ini merupakan pujian

yang luar biasa dan sekaligus menunjukkan sifat tawadhu' dari orang yang mengatakannya, yaitu Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Sebab apa? Dua gelar pertama saja sudah merupakan gelar yang tinggi, apalagi diucapkan oleh ulama sekaliber Syekh Muhammad Ali Al-Maliki.

Pertimbangan lain, dimungkinkan karena kitab induknya Safinatun Naja fima Yajibu Alal 'Abdi Limawlah ditulis oleh seorang ulama besar dan qadli di Hadramaut, Yaman Selatan, Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Ia wafat di Jakarta tahun 1271 H atau 1855 M. Kitab ini sangat populer sebagai karya fikih dasar mazhab Syafi'i.

Tanwirul Hija

Alhafidz Syaikh Achmad Qusyairi bin Shidiq ini lahir di Lasem, Jawa Tengah, tahun 1895. Murid Kiai Kholil Bangkalan ini telah menulis sekitar 20 kitab ini selesai menulis karya syair ini pada tahun 1342H atau 1923M, setelah pengangkatan Syaikh Ali sebagai mufti mazhab Maliki. Syaikh Achmad memberi nama kitabnya Tanwirul Hija yang terdiri dari 405 bait syair dalam bahar Rajaz.

Hubungan Syaikh Ahmad dan Syaikh Ali terjalin sejak lama sejak Syaikh Achmad tinggal di Mekah beberapa tahun sebelum tahun 1920. Kedatangan Syaikh Ali ke In-

donesia dimanfaatkan untuk pertemuan yang kemudian menghasilkan karya syarah yang ditulisnya.

Syaikh Ali mensyarah kitab ini dan selesai pada 13 Ramadhan 1351 H atau 10 Desember 1932M. Artinya, 11 tahun berselang setelah karya matannya ditulis. Syaikh Ali memberi nama kitab syarahnya dengan Inaratud Duja. Inaratud Duja dan dicetak pertama tahun 1379H/1959M oleh penerbit besar Musthafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, digabung dua karya lain Syaikh Ali lainnya: Bulughul Umniyah dan Al-Lum'ah.

Kitab ini membahas detail-detail rukun Islam, mulai dari syahadat, salat hingga zakat, puasa dan haji serta umrah berikut permasalahan-permasalahan yang melingkupinya, dari masalah akidah, bersuci untuk salat dan sebagainya. Syaikh Muhammad Ali lantas mengelaborasi tiap-tiap pembahasan ini secara luas dan

tuntas.

Elaborasi dimaksud meliputi pembahasan dari berbagai segi dan penghampiran, mulai dari segi bahasa, hukum hingga metodologis. Jadi, dalam setiap bahasan hukum, kita hampir selalu menemukan ulasan dan deskripsi panjang tentang detail-detail hukum, dalil-dalil bahkan dasar dan cara pengambilan hukumannya (*istinbath*).

Misalnya, deskripsi penyarah untuk menjelaskan dasar hukum tentang wajibnya *tartib* alias urut sebagai salah satu rukun berwudhu dalam madzhab Syafi'i. Menurut madzhab ini, rukun-rukun wudhu itu, dari mulai niat hingga membasuh kaki, harus dilaksanakan secara berurutan (*tartib*), tidak boleh dibolak-balik.

Kewa-



wordpress.com

Syaikh Ahmad bin Shiddiq Allasemi penulis Tanwirul, jika yang disyarah menjadi inaratud duja.

jiban tartib ini secara literer tidak ditemukan baik dalam *Al-Qur'an* maupun dalam hadis. Namun, madzhab Syafi'i meyakini hal ini sebagai suatu kewajiban berdasarkan hal-hal berikut, sebagaimana dijelaskan dalam kitab syarah ini.

Pertama adalah contoh perbuatan Nabi SAW. Syekh Muhammad Ali menjelaskan bahwa Nabi tidak pernah diberitakan kecuali beliau berwudhu' dengan cara melakukan rukun-rukunya secara berurutan persis seperti dalam uraian Allah pada ayat wudhu', yaitu dimulai dari membasuh wajah, lalu membasuh tangan, kemudian mengusap kepala dan terakhir membasuh kaki.

Alasan kedua, dalam ayat wudhu Allah menempatkan rukun mengusap (yaitu mengusap kepala) di antara rukun-rukun membasuh, yaitu membasuh wajah, membasuh tangan dan membasuh kaki. Padahal, tulis Syekh Muhammad Ali, orang Arab tidak lazim memisahkan dua hal yang sama jenisnya, dalam hal ini membasuh, kecuali ada maksud tertentu. *Al-Qur'an*, sebagai kitab suci yang menggunakan bahasa Arab sebagai medianya, sudah barang tentu menuruti kelaziman tersebut sehingga kitab suci itu tidak akan memisahkan dua hal yang sama jenisnya kecuali karena maksud tertentu, dalam hal ini untuk menun-



Ilustrasi Seseorang Sedang Berwudhu.

dream.co.id

jukkan wajibnya tartib dalam berwudhu.

Lagi pula, sebagai alasan ketiga, ada alasan metodologisnya, yaitu dari hadis Nabi SAW. Ada satu hadis lain yang bercerita bahwa beliau ditanya oleh sahabat tentang cara ber-*sa'i*, yaitu berjalan cepat antara dua bukit sebagai salah satu kewajiban haji. Sahabat itu bertanya, apakah *sa'i* itu dari Bukit Shafa ke bukit Marwah ataukah sebaliknya. Beliau menjawab, "Mulailah (ber-*sa'i*) dari apa yang dimulai *Al-Qur'an*." Ternyata, dalam *Al-Qur'an* kita temukan kalimat di mana kata Shafa disebut terlebih dahulu sebelum bukit Marwah. Coba baca firman Allah ini, "Sungguh Shafa dan Marwah itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah." (*Al-Baqarah: 158*)

Mungkin muncul pertanyaan, sabda Rasulullah itu kan disampaikan dalam konteks (ayat) *sa'i*, jadi tidak bisa dipakai sebagai dalil alias

landasan untuk masalah lain, termasuk untuk (ayat) wudhu? Untuk kemungkinan pertanyaan ini, Syekh Ali menyodorkan kaidah Ushul Fiqh sebagai jawabannya, yaitu kaidah "Yang jadi pertimbangan adalah keumuman lafal bukan kekhususan sebab." Artinya, apabila dalam teks terdapat lafal yang umum, maka teks itu berlaku secara umum pula meskipun teks itu diucapkan untuk kasus (sebab) tertentu. Ternyata, teks hadis Nabi itu, yang beliau sabdakan untuk menjawab pertanyaan seputar cara ber-*sa'i*, beliau sampaikan dengan bahasa yang umum, "Mulailah dari apa yang dimulai *Al-Qur'an*." Dengan begitu, menurut Syekh Muhammad Ali, sabda beliau ini juga bisa diterapkan untuk (ayat) wudhu meski sabda beliau tersebut beliau utarakan guna menjawab masalah *sa'i*.

■ **Hamid Ahmad dan Musthafa Helmy**

CATATAN ASR 2019



mui.or.id

RAMADHAN MENJADI MOMENTUM PERBAIKAN KUALITAS KONTEN SIARAN TELEVISI

Alhamdulillah, kegiatan Anugerah Syiar Ramadhan (ASR) 2019 telah berlangsung sukses dengan beberapa catatan di sana-sini untuk perbaikan di tahun depan. Puncak kegiatan dilaksanakan Senin, 15 Juli 2019, di gedung Bank Syariah Mandiri

Jalan M.H. Tamrin Jakarta Pusat.

Pelaksanaan ASR tahun ini terbilang istimewa, setidaknya karena tiga hal.

Pertama, ASR diselenggarakan bersama oleh empat instansi sekaligus Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai inisiator, Komisi Penyiaran

Indonesia (KPI), Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Lalu jika dibanding tahun lalu, tahun 2019 ada beberapa penambahan kategori penghargaan.

ASR sudah dilaksanakan sejak awal reformasi sampai tahun 2005 oleh MUI secara

mandiri. MUI memang mempunyai perhatian khusus terhadap konten siaran religi pada bulan suci Ramadhan, saat umat Islam menjalankan ibadah secara khidmat. Tahun 2006 dihentikan, karena MUI kecewa pada tayangan TV Ramadhan yang terus menurun kualitasnya. Maka sejak 2007, MUI merutinkan pantauan TV Ramadhan, yang porsi terbesar berisi kritik.

Setelah tampilan TV Ramadhan mulai membaik secara berarti sejak 2013, pada tahun 2015, ASR kembali dihidupkan. Kali ini, MUI menggandeng Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Tiga tahun berikutnya, 2018, Kementerian Pemuda dan Olahraga bergabung mendukung kegiatan ini dengan memberi tambahan peng-

hargaan untuk beberapa kategori bidang kepemudaan. Tahun 2019 ini, Bank Mandiri Syariah turut berpartisipasi, dengan menambah penghargaan di bidang syariah lifestyle, lalu pada program yang bermuatan literasi keuangan syariah, gaya hidup halal, maupun spirit hijrah ke arah yang lebih baik.

Jadi total ada delapanbelas kategori penghargaan yang diberikan kepada para insan pertelevisian yang meliputi sembilan kategori umum dari MUI dan KPI, termasuk kategori utama atau juara umum untuk televisi yang menyajikan tayangan Ramadhan terbaik. Lalu ditambah enam kategori khusus dari Kemenpora dan tiga kategori khusus lainnya dari BSM.

Berikut ini adalah delapanbelas kategori dan pemenang ASR 2019 kemarin:

1. Kategori Program Reality Show Terbaik ~ Kupenuhi Panggilanmu (NetTV)
2. Kultum ~ Mutiara Hati Quraisy Syhihab (SCTV)
3. Kategori Wisata Budaya ~ Muslim Taveelers (Net TV)
4. Kategori Ceramah ~ Indahnya Ramadhan (TV One)
5. Kategori Sinetron ~ Para Pencari Tuhan 12 (SCTV)
6. Kategori Pencarian Bakat ~ Akedemi Sahur Indonesia (AKSI – Indonesia)
7. Kategori Talk Show ~ Halo Ustadz (iNewsTV)
8. Kategori Program Dokumenter ~ Menjemput Berkah (Trans 7)
9. Kategori Dai Muda Inspiratif ~ Suwandi (AKSI Indosiar)
10. Kategori Group Musik Muda Inspiratif ~ Aleehya (Indosiar, NET TV)
11. Kategori Host Muda Inspiratif ~ Muthia Amalia (Muslim Traveler – NET TV)
12. Kategori Aktor Muda Inspiratif ~ Silvia Anggraini (PPT – SCTV)
13. Kategori Production House Inspirasi Pemuda Indonesia ~ The Little Giantz (NUSSA – NET TV)
14. Kategori Program Inspirasi Pemuda Indonesia ~ Titik Balik (iNews)
15. Kategori Halal Gaya Hidup Sesuai Syariah ~ (Muslim Traveler – NET TV)
16. Literasi Keuangan Syariah ~ Economic Challenge Special Ramadhan (Metro TV)
17. Hijrah Menuju Tuntunan Syariah ~ (Metro TV)
18. Kategori Televisi Terbaik Anugerah Syiar Ramadhan Tahun 2019 ~ Net TV



Prof Dr KH Maruf Amin Membuka ASR 2019

mui.or.id

Kiai Ma'ruf: Teruslah Berkarya!

Hal kedua yang membuat ASR 2019 terasa istimewa adalah karena KH Ma'ruf Amin tidak hanya hadir sebagai Ketua Umum MUI tetapi juga sebagai wakil presiden terpilih untuk periode 2019-2024. Bukan soal terpilih sebagai wakil presiden itu saja yang istimewa, akan tetapi kehadiran sosok wakil presiden yang sangat konsern mengamati konten siaran televisi dalam ajang ASR itu merupakan sebuah pesan dan optimisme bahwa kualitas siaran televisi kita akan lebih baik dan lebih baik lagi serta lebih bermanfaat buat umat.

Usai penyampaian kata sambutan dari Ketua KPI, Menteri Pemuda dan Olahraga serta perwakilan BSM, semua perhatian tertuju pada sosok kiai kharismatik itu. KH Ma'ruf Amin menyampaikan kata sambutan sekaligus taushiyah sebagai Ketua Umum MUI.

Anugerah Syiar Ramadhan atau ASR, kata beliau, adalah bagian dari tugas MUI yakni sebagai penjaga dan pelayan umat atau disebut juga *khadimul ummah*. Pengawasan konten siaran yang digawangi oleh Komisi Infokom MUI, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penganugerahan kepada televisi atau insan per-

television yang menyajikan konten siaran yang baik selama bulan Ramadhan, dimaksudkan agar konten siaran televisi kita menjadi lebih baik sepanjang tahun, bukan hanya untuk bulan Ramadhan saja. Sebagaimana spirit Ramadhan, puasa dan rangkaian ibadah yang dilakukan dibulan Ramadhan adalah latihan untuk perbaikan kualitas diri untuk sebelas bulan berikutnya.

Jadi perbaikan konten siaran tidak hanya berhenti hanya pada bulan Ramadhan.

"Tentu, produk televisi yang positif, kita harapkan, tidak hanya muncul di bulan Ramadhan. Lalu setelah

Ramadhan berubah jadi tak terkendali? Bukan demikian. Ramadhan dijadikan momentum untuk evaluasi, perbaikan, dan tempat berlatih memproduksi program positif. Sebagaimana fungsi ibadah Ramadhan, sebagai tempat berlatih untuk perbaikan akhlak di sepanjang tahun,” kaya Kiai Ma’ruf Amin.

“Kepada seluruh penerima Anugerah dan nominee, saya sampaikan Selamat. Teruslah bersemangat dan kreatif membuat karya yang bermanfaat pada umat dan bangsa. Insya Allah, karya Bapak Ibu semua ini akan menjadi amal jariyah, menjadikan rizki Bapak Ibu sekalian semakin berkah, keluarga Bapak Ibu semakin sakinah, penuh mawaddah wa rahmah,” tambahnya.

Perbaikan Konten

Menurut Asrori S. Karni, Ketua Komisi Infokom MUI sekaligus penanggung jawab tim pemantau siaran TV Ramadhan, penganugerahan 2019 tersebut dilakukan setelah melalui proses pemantauan selama bulan Ramadhan 1440 kemarin. Dikatakannya, secara umum konten-konten siaran keislaman semakin meningkat. Semua stasiun televisi mempunyai program khusus religi di bulan Ramadhan. “Tahun 2019 lebih banyak bertemakan *Al-Qur’an*,” kata Asrori.

Sebagian program dipersiapkan secara serius jauh-jauh hari dan patut diapresiasi. Namun masih ada saja program televisi yang menyajikan tayangan ramadhan yang tidak layak, dan ternyata masih yang itu-itu saja.

Pertengahan Ramadhan 1440 H, Komisi Infokom MUI

MUI merekomendasikan untuk dihentikan tayangannya, karena kontennya yang buruk, apalagi untuk bulan Ramadhan. Dua program ini tetap tayang dan tanpa perubahan isi secara signifikan.

Tiga program TV Ramadhan lainnya “Ramadhan di Rumah Uya” (Trans 7), “Brownis



Rapat Juri ASR 2019 di Kantor KPI

mui.or.id

memberi teguran keras atas dua program tayangan Ramadhan, yakni “Sahurnya Pesbukers” dan “Pesbukers Ramadhan” yang tayang di stasiun televisi swasta ANTV. Dua program ini diminta untuk segera dihentikan. Pasalnya, pada Ramadhan tahun sebelumnya, dua program ini termasuk lima program yang

Sahur” (Trans TV) dan “Ngabuburit Happy” (Trans TV), yang MUI sarankan untuk berhenti pada Ramadhan 2018, tahun 2019 ini sudah tidak tayang lagi. Tapi Sahurnya Pesbuker dan Pesbukers Ramadhan masih tayang Ramadhan 2019 ini, dan tetap dengan gaya konten yang tidak patut.

Ketua MUI Bidang Infor-

masi dan Komunikasi KH. Masduki Baidlowi mengatakan, sejumlah warga masyarakat mengirim email pengaduan ke MUI, minta program Pesbukers Ramadhan dibubarkan. Ada yang menyebut, ini program tak bermoral dan memalukan. Dikatakan, sepanjang Ra-

madhan, telah dilakukan tiap menjelang Ramadhan, yang diselenggarakan KPI dan MUI. Untuk itu, MUI minta otoritas bidang penyiaran memberi sanksi berat pada dua program ini, dengan menghentikan program, mengingat tak terlihat adanya *i'tikad* baik pembenahan," kata Masduki.

industri televisi lebih mematuhi regulasi, nilai agama, dan asas-asas kepatutan dan kesopanan dalam masyarakat.

Langkah tersebut dimaksudkan agar konten siaran televisi lebih layak bagi umat.

Rakornas Infokom

Hal ketiga yang membuat ASR 2019 istimewa karena diselenggarakan bersamaan dengan Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Bidang Infokom MUI. Saat memberikan kata sambutan, KH Ma'ruf Amin mengucapkan selamat datang kepada perwakilan MUI dari berbagai daerah seluruh Indonesia dan MUI Kota/Kabupaten se-Jabodetabek, serta beliau membuka kegiatan Rakornas secara resmi yang sudah dimulai pada siang hari sebelum acara malam puncak ASR 2019.

KH Masduki Baidlowi mengungkapkan, Rakornas ini bertujuan menyamakan persepsi antara MUI Pusat dengan MUI daerah khususnya dalam bidang infokom. Selain itu, Rakornas ini juga untuk mengkoordinasikan informasi dan komunikasi dengan komisi lain di lingkup MUI Pusat. Ia menilai pertemuan seperti ini penting karena inti dari sebuah organisasi adalah informasi dan komunikasi. Jaringan komunikasi yang lancar di dalam organisasi akan memudahkan proses organisasi di



Public Relation and Publicity Manager Metro TV Henny Puspitasari menerima Anugerah Syiar Ramadan 2019

mui.or.id

madhan 1440 kemarin, tim pemantau MUI yang berasal dari lima komisi yakni Komisi Infokom, Fatwa, Dakwah, Pendidikan, dan Kajian, kembali melakukan pemantauan, yang rutin dijalankan sejak 2007.

“Langkah-langkah edukasi, penyamaan persepsi tentang standar etik tayangan TV, apalagi di bulan Ra-

Masyarakat diserukan tidak menonton program ini, apalagi anak-anak dan remaja. Dunia iklan disarankan tidak mendukung program yang tidak mendidik dan berselera rendah seperti ini. Komisi I DPR yang membidangi penyiaran, juga diminta perlu lebih serius menempuh langkah-langkah yang membuat



Trans 7 - Menjemput Berkah - Kategori Program Dokumenter

mui.or.id

dalamnya.

Kegiatan Rakornas dipusatkan di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat. Tema besarnya adalah Terkait perkembangan teknologi yang ditandai adanya disrupsi informasi. Tak kurang, Menteri Informasi dan Komunikasi (Kominfo) Rudiantara hadir dalam kesempatan.

Menkominfo dalam kesempatan itu mengatakan bahwa peran MUI di bidang informasi dan komunikasi akan sangat besar dan terus bertambah besar karena dunia semakin dalam memasuki era digital.

“Era informasi yang berada di dunia digital itu sangat luar biasa, saya berterimakasih kepada MUI yang telah mengeluarkan fatwa bagaimana umat Islam bermedia sosial, fatwa tersebut dikeluarkan tahun 2017,” ujarnya di hotel Grand Cempaka.

Konsolidasi Organisasi

Rakornas Infokom MUI se-Indonesia berlangsung selama tiga hari ditutup secara resmi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (17/07) siang.

Ketua Komisi Infokom MUI, Asrori S. Karni mengungkapkan, selama tiga hari ini peserta menjalani dua kegiatan utama. Pertama, kata dia, peserta rakornas belajar dari pengalaman komisi dan lembaga di internal MUI dalam melaksanakan konsolidasi. Dalam hal ini, Komisi Infokom MUI menggandeng LPPOM MUI, Komisi Fatwa, Komisi Dakwah, serta simulasi aplikasi Webinar Zoom dari DSN MUI agar bisa berkoordinasi dengan jarak jauh.

Dalam upaya tersebut, dia menyampaikan, Komisi In-

fokom juga melakukan kerjasama dengan lembaga mitra luar seperti Pegadaian Syariah terkait Industri berbasis IT, Kemenkominfo tentang tantangan media informasi dan komunikasi terknini, serta Kemenag tentang moderasi beragama.

“Dalam pengayaan materi ada lesson learned yang berasal dari DSN, LPPOM MUI, Komisi Fatwa, dan Komisi Dakwah. Lalu ada paparan Menkominfo, Pakar ICT, dan industri syariah berbasis IT menggandeng Pegadaian Syariah, serta orasi Menteri Agama,” paparnya, Rabu (17/7) usai penutupan Rakornas di Hotel Grand Cempaka, Jakarta.

Selain pengayaan materi, lanjut dia, peserta rakornas juga mengikuti sidang yang terbagi ke dalam empat komisi. Komisi satu membahas mengenai organisasi dan Jaringan, komisi dua membahas program kerja, ketiga membahas pengembangan media MUI, dan komisi terakhir membahas rekomendasi.

Pada komisi organisasi dan jaringan, Komisi Infokom MUI akan melakukan perombakan tata organisasi dan jaringan di lingkungan MUI. Lingkungan MUI tersebut mencakup lingkungan internal antara sesama komisi/lembaga di MUI Pusat dan MUI daerah atau lingkungan eksternal dengan mitra seperti



Panitia ASR 2019

pemerintah, media, maupun pihak-pihak lain pada era baru yang berciri dan berdampak disruptif. Hal ini, kata dia, untuk menegaskan peran MUI sebagai *khadimul ummah wa shadiqul hukumah* (pelayan umat dan mitra pemerintah).

“Hal kedua terkait program kerja, Komisi Infokom akan melakukan modifikasi dan *upgrade* program kerja, yg menekankan prinsip kolaborasi pusat-daerah, internal dan eksternal, berjejaring, dan memanfaatkan perkembangan teknologi, khususnya ICT, untuk mengoptimalkan peran ulama, khususnya menghadapi disrupsi informasi, yg di antara cirinya, mengguncang dan mengejutkan,” katanya.

Terkait pembahasan pengembangan media MUI, dia mengungkapkan pengelolaan media di Komisi Infokom MUI Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dirancang agar semakin konvergen. Media-media MUI nantinya juga akan memaksimalkan *multiplatform* dan mengikuti dinamika cepat ICT agar ikut membentuk iklim arus informasi dan komunikasi yg sehat, sebagaimana dipandu dalam Fatwa MUI tentang Pedoman Muamalah di Media Sosial dan fatwa lain yg terkait.

Terakhir, terkait rekomendasi, Rakornas kali ini menghasilkan dua aspek rekomendasi yai-

tu dari sisi eksternal dan internal. Secara internal, Komisi Infokom akan menekankan komitmen yang kuat, konsolidasi, dan kolaborasi dengan semua bidang Infokom di semua jenjang MUI dalam menghadapi disrupsi informasi.

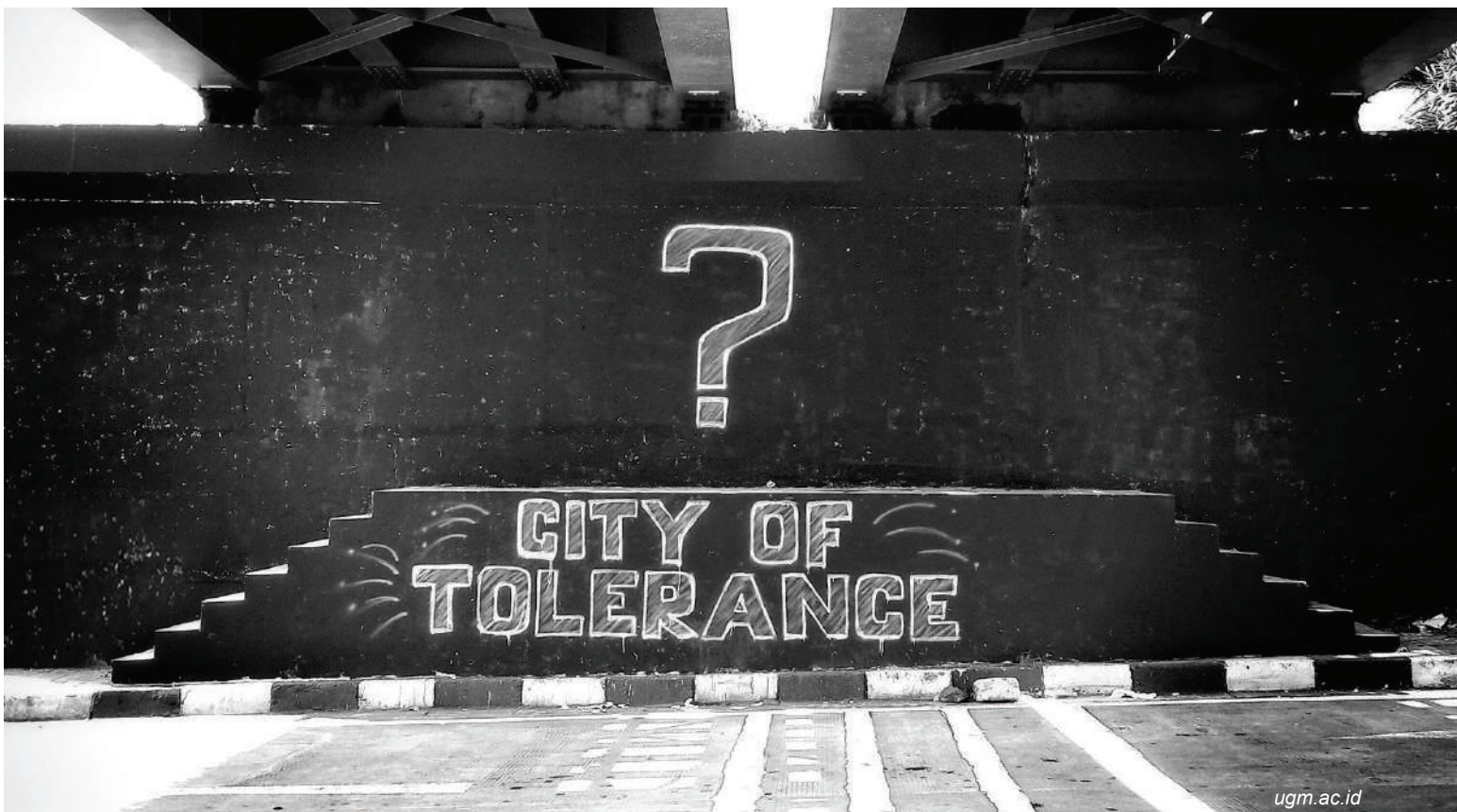
Secara eksternal, hasil Rakornas mendorong sikap proaktif untuk mendorong

kerjasama, membangun mitra dengan berbagai stake holders seperti regulator, Kominfo, Dewan Pers, KPI, industri media massa, dan sejenisnya.

■ A. Khoirul Anam



Silvia Anggaraini - Aktor Muda Inspiratif



MUI DAN AGENDA PENGUATAN TENUN KEBANGSAAN

Catatan Pra Rakernas MUI 2019

Potret Persaingan Ideologi

Indonesia adalah negara hukum. Segala hal terkait terganggunya keadilan dan distribusi hak serta kewajiban publik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum (*Abdul Azis Hakim: 2011*). Bagi MUI, penyelesaian melalui jalur hukum terhadap kasus-kasus yang terkait ketertiban publik menjadi pilihan paling adil dan final di antara mekanisme perdamaian yang ada agar selesai pula konflik dan tensi antar kelompok

yang bertikai di dalamnya. Saatnya antar kelompok bertikai melebur bersama untuk memastikan perjalanan bangsa Indonesia kembali ke jalur yang benar dan cepat pasca keterbelahan elemen bangsa Indonesia dalam Pilpres dan Pileg 2019.

Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR serta DPD RI telah ditetapkan. Mer ekalah pemimpin dan wakil seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat. Namun faktanya, residu gerakan kelompok atau ideologi terutama yang ber-

corak keagamaan dan kebangsaan yang pernah bersitegang baik di masa kontestasi Pilpres dan Pileg 2019 atau jauh sebelumnya masih terus berjalan dengan ajang dan ekspresi yang teraktual.

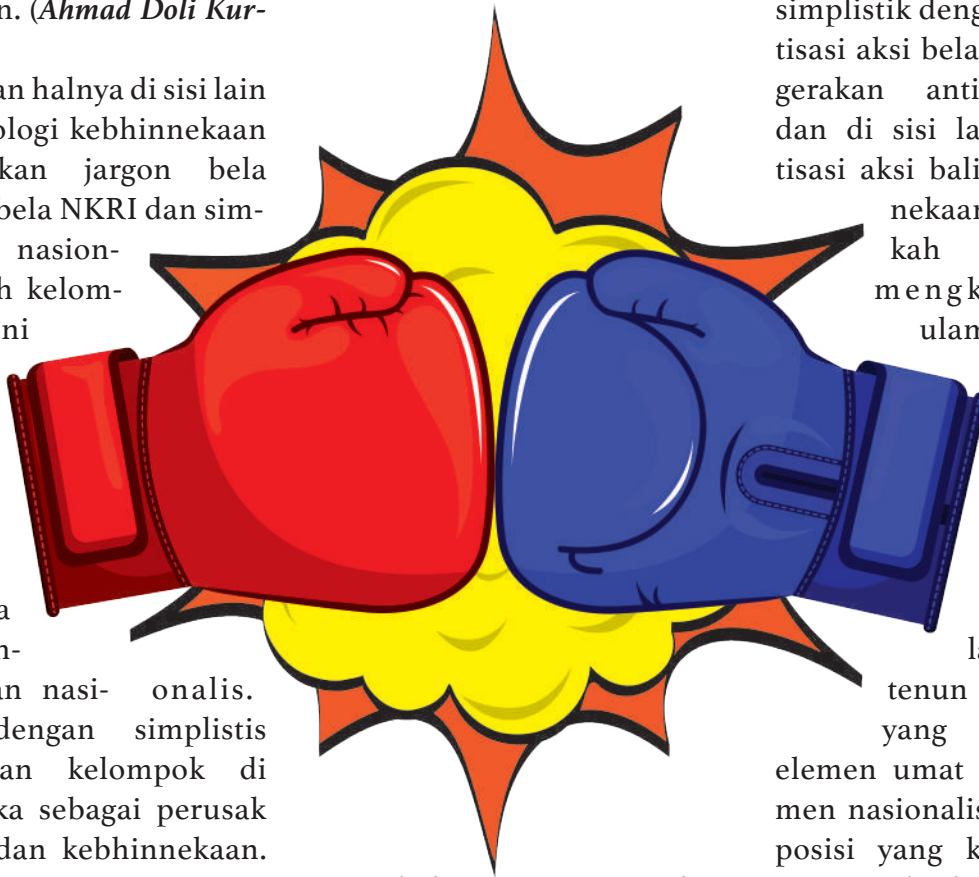
Residu ideologi keagamaan masih meneruskan agendanya dengan brand aksi bela khilafah, aksi menolak kriminalisasi ulama, dan sebagainya. Ini seolah menjadi trend baru aksi dan demonstrasi isu politik berkonten simbol agama yang terus dihangatkan tergantung isu dan kepentingan

di lapangan. (Ahmad Doli Kur-
nia: 2017)

Demikian halnya di sisi lain residu ideologi kebhinnekaan menggunakan jargon bela Pancasila, bela NKRI dan simbol-simbol nasionalis. Seolah kelompok ini menggunakan kooptasi dan mengokupasi bahwa seolah mereka saja yang Pancasila dan nasionalis. Mereka dengan simplistik memosisikan kelompok di luar mereka sebagai perusak Pancasila dan kebhinnekaan. (Ahmad Mansyur Suryanegara: 2018)

Bagi kelompok residuis keagamaan, langkah-langkah aparat penegak hukum sudah tidak netral dan melanggar hukum dalam penegakan hukum itu sendiri. Meski di sisi lain, ada tendensi bahwa aksi residuis keagamaan tersebut juga bermuatan politis dan tidak murni gerakan moral. Sepertinya ada agenda berkelanjutan meski tujuan politis electoral mereka dianggap belum sukses mengantarkan figur yang mereka dukung tidak terpilih sebagai pemimpin nasional pada Pilpres.

Tendensi inilah yang oleh kelompok residuis kebhinnekaan dijadikan ala-



san bahwa gerakan residuis keagamaan sudah melewati rambu-rambu komitmen pluralitas kebangsaan. Model-model gesekan gerakan antara simbol bela agama dan bela negara seperti ini disinyalir akan terus “dipelihara” sampai tujuan politik elektoral 2024 esok.

Kondisi ketegangan horizontal tersebut telah melahirkan sketsa konflik antara simbol agamis versus simbol nasionalis meski kedua simbol sosial tersebut tidak bisa dianggap representasi kelompok masing-masing. Menanggapi hal tersebut, MUI bisa dan telah menyampaikan formula sikap keagamaan kepada publik agar tidak bersikap

simplistik dengan menstigmatisasi aksi bela agama sebagai gerakan anti kebangsaan, dan di sisi lain menstigmatisasi aksi balik bela kebhinnekaan sebagai langkah represif dan mengkriminalisasi ulama (Rakernas MUI: 2016)

Dalam kondisi demikian, bagaimana langkah dan peran MUI dalam penguatan tenun kebangsaan yang memosisikan elemen umat Islam dan elemen nasionalis berada dalam posisi yang kuat? Bagaimana MUI berkontribusi untuk menyadarkan seluruh elemen bangsa tentang siapa sesungguhnya perusak tenun kebangsaan?

Komitmen MUI untuk Integrasi Religius - Nasionalis

MUI berpandangan bahwa baik elemen agamis maupun nasionalis adalah dua elemen penting dan fundamental dalam proses lahirnya NKRI. Lahirnya NKRI adalah berkat kesadaran penuh elemen agamis dan nasionalis untuk saling bergandengan tangan dan menghindari ego sektoral masing-masing. Kedua elemen tersebut sama-sama secara ikhlas mewakafkan en-



Rakornas Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama MUI

mui.or.id

ergi, pikiran, kesadaran, jiwa, raga, harta, benda, dan segala yang mereka miliki demi berdirinya negara-bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hasilnya, nilai-nilai agamis dan nasionalis berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaannya.

Kedua elemen tersebut juga dengan sepenuh hati dan di bawah pancaran cahaya ilahi mengikrarkan bentuk negara religius (*religious state*), bukan negara agama (*theocratic*) dan apalagi negara sekuler (*secular state*). Bentuk negara religius ini diyakini akan mampu melampaui capaian-capaian dua bentuk negara yang terakhir. Para *founding leaders* begitu yakin bahwa sinergi dan harmoni antara nilai-nilai transenden dan nilai-nilai humanitarian akan melahirkan budaya bangsa Indonesia yang unggul. (*Soekarno: Di Bawah Bendera Revolusi: 1960*)

MUI menghimbau agar elemen agamis jangan mudah menafikan nasionalisme sehingga terjebak pada tekstualisme beragama secara rigid. Demikian pula elemen nasionalis jangan mudah alergi terhadap agama beserta simbolnya sehingga terjebak dalam sekularisme. Antara agamis dan nasionalis tidak bisa, tidak seharusnya, dan tidak akan dipertentangkan, dibenturkan, diadu domba, dandijadikan alasan pertikaian yang berujung pada tercerai-berainya tenun kebangsaan dalam rumah Pancasila. Hilangnya kesamaan cara pandang ber-NKRI di antara keduanya menandakan tiadanya kehadiran tafsir beragama dan tafsir bernegara dalam menjamin kehidupan beragama bagi warga bangsanya dalam sketsa rahmat, dan sekaligus juga menghilangkan rahmat dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perusak Tenun Kebangsaan

Dalam ketegangan stigma antara kubu agamis dan kubu nasionalis, MUI seyogyanya bisa melihat indikasi kuat adanya kekuatan yang tidak menginginkan unsur religius dan unsur nasionalis bersatu. Sebutlah kekuatan itu dengan *the invisible hand*. Eksistensi *the invisible hand* ini diidentifikasi dengan indikator berikut:

Pertama, maraknya ekstremisme beragama. Hal ini terlihat dari munculnya pemikiran dan perilaku beragama yang gemar mengkapling surga di atas stempel khilafah, perilaku kelompok agama yang menghalalkan darah dan nyawa kelompok lain yang tidak sepaham dengannya, serta perilaku aliran agama yang gemar menyalahkan dan mengafirkan aliran lainnya sebagai telah keluar dari tuntunan *Qur'an* dan Sunnah. Hal ini diperparah dengan berbaurnya kelompok ini dengan gerakan aksi yang langsung menghadap-hadapkan tuduhan bahwa aparat penegak hukum telah melakukan kriminalisasi terhadap tokoh mereka.

Kedua, maraknya radikalisme sekuler yang distigmatisasi kepada elemen kebhinnekaan yang mudah menuduh bahwa umat Islam adalah pelaku anti kebhinnekaan. Umat Islam dituduh sebagai gerakan anti Pancasila

la, pro makar, dan melawan pemimpin negara. Kelompok radikal-sekuler ini selain bercirikan otoriter dan hegemonik, berupaya mendelegitimasi peran agama, tetapi juga berupaya mengaburkan tradisi luhur dan lanskap tata kawasan warisan nenek moyang Nusantara untuk diganti dan digeser dengan budaya glamour, hedon, konsumeris, dan permisif yang menghalalkan kebebasan tanpa batas.

Ekstremisme agama jelas menodai ruh beragama yang hanif, moderat, toleran. Sementara radikalisme sekuler adalah pemberontakan terhadap prinsip negara religius yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong-royong, kolektivitas, permusyawaratan, dan dialogis.

Polarisasi keduanya nyata-nyata telah memberi kesempatan merebaknya kelompok *the invisible hand*, propagandis pengadudomba anak-anak bangsa religius dan nasionalis yang sejatinya sama-sama memiliki komitmen untuk

makin menjauhkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai nasionalisme dari denyut nadi kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. (Ma'ruf Amin: *Empat Pilar Kebangsaan: 2013*).

MUI sebagai Poros Episentrum Religius - Nasionalis

Melihat indikasi separasi dan adu domba antara unsur religius dan nasionalis tersebut, seperti apa posisi dan peran yang sebaiknya dimainkan MUI agar rajutan tenun religius dan nasionalis tetap kuat. MUI seyogyanya semakin memperteguh gerakan keagamaan yang menitikberatkan kepada semangat toleransi (*al-hanafiyah al-samhah*) baik intra dan antarumat beragama, menerima dan menyerap nilai-nilai kearifan lokal (*al-'adah muhakkamah*), dan menerima perbedaan sebagai sebuah sunnatullah (*ikhtilaful ummah ar-rahmah*), serta meneguhkan komitmen terhadap NKRI (*at-tawathuniyah*).

MUI juga hendaknya mendorong gerakan nasionalis agar lebih memahami dan menghargai nilai-nilai religius, merawat dan melestarikan khazanah kearifan lokal (*local wisdom*), serta melestarikan nilai-nilai luhur budaya ketimuran bangsa Indonesia yang santun, gotong-royong, bersaudara (*torang samua basudara*), dan mengayomi yang muda serta menghormati yang tua.



brilio.net

saling menghormati, mau bekerjasama membangun negeri tercinta, dan berkomitmen terhadap keutuhan NKRI dan tegaknya Pancasila dan UUD 1945.

Kelompok *the invisible hand* dan propagandis pemecah-belah persatuan rakyat Indonesia ini berpotensi merusak tenun kebangsaan religius yang selama ini telah terajut dengan indah di negeri Indonesia. Perilaku mereka juga bisa melahirkan budaya baru yang se-



tirto.id



islami.co

MUI selayaknya menjadi garda depan untuk memastikan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap kelompok *the invisible hand* dan propagandis yang gemar mengadudomba sesama anak bangsa serta memecah-belah persatuan dan kesatuan negara Indonesia.

MUI terus mendorong penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun yang berupaya mengganti konsensus berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. MUI senantiasa mendorong elemen agamis dan nasionalis untuk bersama-sama menjaga paham keagamaan dan ideologi nasionalisme bangsa Indonesia dari pengaruh paham yang merusak pemikiran dan kesadaran rakyat Indonesia, seperti paham yang meleakalkan fitnah, provokasi, adudomba, dan makar untuk tercapainya kepentingan pribadi maupun golongan tertentu dan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara Indo-

nesia.

MUI terus mendorong elemen agamis, nasionalis, serta elemen-elemen pelestari khazanah kebudayaan Nusantara untuk bersatu dan bersama menjaga kedaulatan serta ketahanan nasional dari ancaman yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa baik dari dalam maupun luar negeri.

MUI akan terus memperkuat program revolusi akhlak bangsa dengan melandasinya dan mentransendensikannya berdasarkan akhlak agama sebagai panggilan terhadap menjaga keluhuran agama dan tata kelola kehidupan dunia yang baik (*hirasat ad-din wa siyasad ad-dunya*).

Agenda Arus Baru Kebudayaan Bangsa

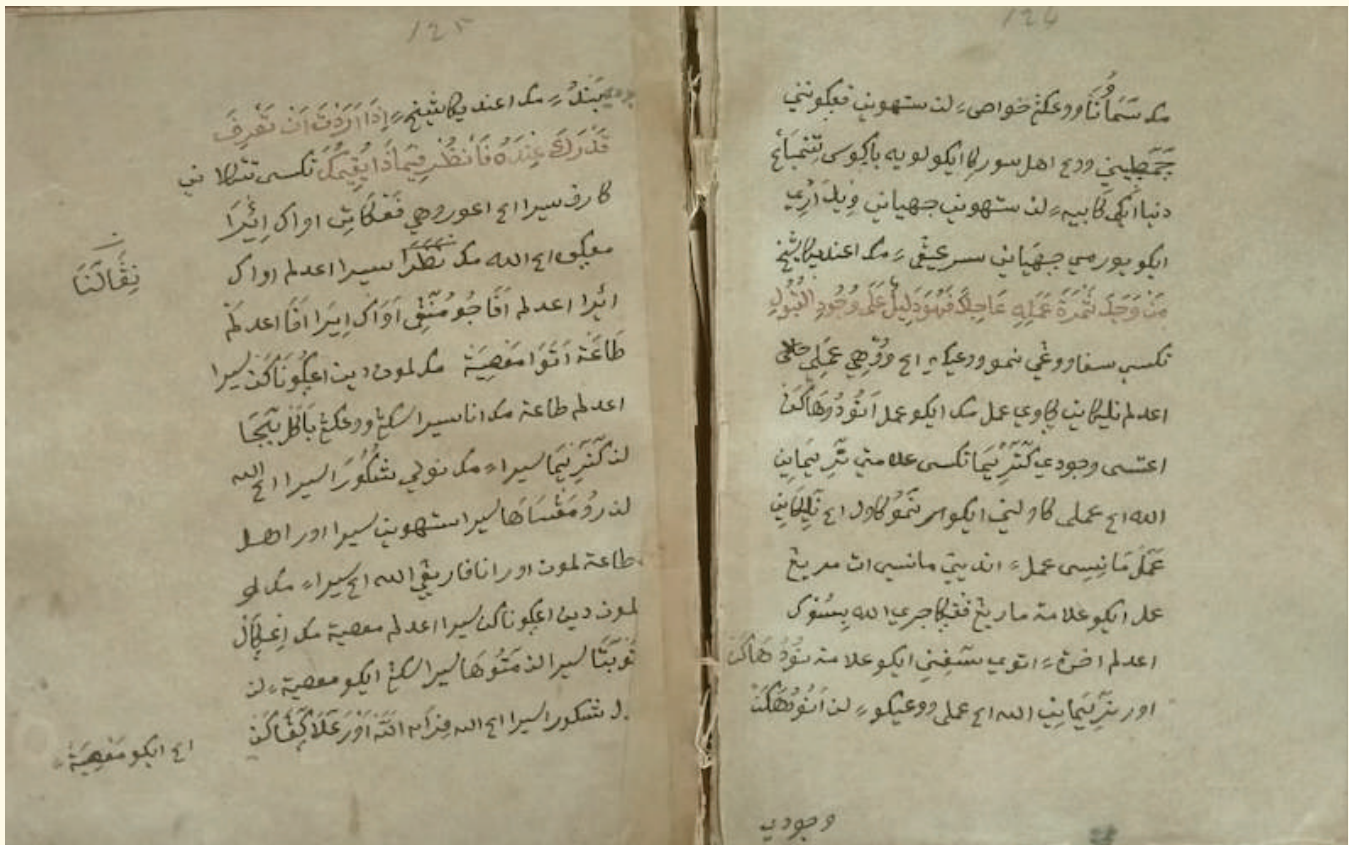
MUI hendaknya terus memperkuat dan mensestakan titik pijak Islam *Wasathiyah* (*moderation*) dan episentrum Islam Kebangsaan. Operasionalnya, MUI terus pro aktif memoderasi elemen ekstrem-

isme agama agar menerima nilai-nilai kebangsaan, dan dalam waktu yang sama MUI juga pro aktif memoderasi elemen radikalisme sekuler agar menerima nilai-nilai agama dalam praktik berbangsa dan bernegara.

Sudah waktunya energi umat lebih dibesarkan dan digemakan terhadap takbir dan *show of mass* untuk menggelorakan umat giat inovasi dalam capaian riset dan teknologi tepat guna, umat giat dalam pemberdayaan dan solusi ekonomi keumatan, umat giat dan gigih berjihad memerangi korupsi dan narkoba, umat lari cepat mengejar ketimpangan kesejahteraan, umat lari mengejar percepatan kesejahteraan pada keteringgalan daerah terpencil. (*Rakernas MUI 2018*).

Bela agama tidak cukup bersifat simbolik-normatif. Sejatinnya, substansi bela agama adalah pembelaan umat terhadap upaya pengentasan segala hambatan yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Tantangan dan hambatan negara dan bangsa ini juga menjadi tantangan dan hambatan umat. Berkontribusi dan membela kepentingan bangsa adalah bela agama yang sesungguhnya. Bela bangsa adalah karakter sekaligus tugas dari bela ulama.

■ **Arif Fahrudin**
(Sekretaris LPBKI-MUI)



Tulisan Tangan dari Karya Kiai Saleh Darat.

كياهي محمد صالح دارت

ماها كورو علماء تاناها جاوا

مروفاكن مها كورو علماء دي جاوا يغ سچارا اوسيا لبيه توا داري كياهي خليل بگلان. كياهي صالح اداله ساوراغ ولي الله دان كورو قنديرى نهضة العلماء كياهي حاج هاشم اشعري دان قنديرى محمدية كياهي حاج احمد دحلان ناما-ناما لايغ ترچاتات ادالاه كياهي حاج محفوظ (قنديرى فونفيس ترماس، فاجيتان)، كياهي حاج إدريس (قنديرى فونفيس جامسارين، سولو)، كياهي حاج شعبان (علماء اهلي فلك داري سماراغ)، قغهورلو تفسير انوم داري كراتون سوراكارتا، كياهي حاج دلهر (قنديرى فونفيس واتوا حوعول، مونتيلان)، دان كياهي (.حاج منور (علماء اهلي القران، كرافياك بوكياكارتا مماغ، كياهي حاج صالح دارت تاك سفوقولير علماء لايغ، اتاو موريد-موريدپا. فداحال، كياهي صالح مميليكي باپاك كاريا دان

ناما كياهي صالح دارت دي سماراغ ممكن كيني هاپا بيبسا ددافاتي فدا سبواه مسجد يغ دباغون علماء ايتو دي جالان كاكاف 212، سماراغ. لتاكيا سكيتر دووا كيلوميتير داري مسجد اكوغ جاوا تگاه. مسجد بروارنا هيجاوا ايتو دباغون تاهون 1992 ستلاه باغونان لاما هانچور كارنا بانجبر روب ساتوآباد يغ لالو دي سيني جوگا ادا سبواه فسانترين يغ بسار دي زمانپا. فغاسوهيا اداله كياهي حاج محمد صالح دارت. علماء بسار كباغگان تاناها جاوا كالا ايتو دان وفاة دمقامكن دي فمكامن عموم برکوتا، کوتا سماراغ سيفا يغ مغنال رادين اجغ كارتيني، سهاروسپا جوگا مغنال كورو اگاماپا يالايتو كياهي حاج محمد صالح دارت يغ فرناه منجادي توكوه سجاره دان قنديدیکن دي اخير اباد 19. كياهي صالح

جاوا.

مواسل دان كلوارغا

ايا برناما محمد صالح. ايا لاهير دي ديسا كدو غ جومبلغ، كچاماتان مايوغ، كابوئاتن جفارا قادا تاهون 1820. دالم كتاب- كتاب يغ دتوليسيا، ديا سلالو ميبوت ديريبا دغان ناما محمد صالح ابن عمر السماراني، كاتا تراخير منونجوك تمقات تيغكاليا، سماراغ

قلمباهن ناما دارت اداله سيوتن اتاس دايره تمقات ايا تيغكال يغ تاك جاوه داري قنتاي اوتارا سماراغ. هيغكا كيني ناما دارت ايتو تتاف ليستاري دان دجادين فراساستي ناما دوا كامفوغ: نيغاه دارت دان دارت تيرتو. ساعت ايني كامفوغ دارت ماسوك دالم

ولايه كلوراهان دادف ساري، كچاماتان سماراغ اوتارا اياه صالح، كياهي عمر، اداله علماء تركموكا يغ دفراچايا قاغيران دفونيگورو دالم فراغ جاوا ملاوان بلاندا دي ولايه سيسير اوتارا جاوا. سنله مندافات بكال علم-علم داسار اكاما داري اياهيا، صالح مولاي مغمبارا، بلاجر داري ساتو علماء ك علماء لايين كياهي عمر مغارهن فرتاماناكيا اوننو بلاجار كفاذا كياهي شهيد دي واتورايا، قاتي. كياهي شهيد اداله تمان پانتري كياهي عمر. صالح بلاجار كتاب فقه، سفرتي فتح القريب، فتح المعين، منهاج القويم، دان لايين سباكيا

صالح ترليهات منونجول دي فسانتيرين ايني. كبتولان واتورايا بردكاتن دغان ديسا كاجين يغ باياك ميبليكي علماء سهيغكا صالح للواسا منمبا علم داري سجمله علماء يغ ادا. كاجين اداله ديسا تمقات برمقيم شيخ احمد متمكن، ساوراغ علماء بسار دي اباد

18.

صالح باياك برجومفا دغان كياهي-كياهي مشهور يغ دكنال ميبليكي كدالامان سرتا كلواسان علم لاهير دان باطين، دان سباكيان بسار كموديان منجادي كوروا. كياهي شهيد اداله چوچو داري شيخ احمد متمكن يغ تركنال دغان سرات چبوليك-پا يغ هيدوف دي زمان ماتارام كرتاسورا. صالح، لبيه خصوص، جوگا مندافتكن سند كعلموان لاغسوغ فاذا سنياف كتاب يغ داجرکان ايتو هيغكا كفاذا قغاراغا

سلانجوتيا، ايا بلاجار كفاذا كياهي رادين حاج محمد صالح ابن أسنوی دي قدوس. دي سيني كياي صالح مچاي كتاب تفسير الجلالين كاريا امام سيوطي دان امام محلي. ايا جوگا بلاجار علم نحو دان صرف داري كياهي اسحاق داماران، بلاجر علم فلك داري كياهي ابو عبد الله محمد الهادي الباقوني. برلانجوت كفاذا سيد احمد بافقيه باعلوي دمي مچاي جوهره التوحيد بواه كاريا شيخ ابراهيم اللقاني دان منهاج العابدین كاريا الغزالي

تاك فواس، سلانجوتيا ايا بلاجار كفاذا كياهي مرتضى يغ جوگا صحابة اياهيا. ايا جوگا ترچاتات قرناه بلاجار خصوص دغان كياهي محمد ارشاد دي لوانو، باكلين، فورورجا. صالح تركسان بلاجار دي سيني هيغكا دتواغكن دالم ساتو بنتوك شعير



Makam dan Masjid Kiai Saleh Darat.

جوگا باياك موريد. باهكان، باياك قجابت دي كالا ايتو سچارا خصوص مچاي كفاذا كياهي صالح. حال ايتو بيسا دفاهي بهوا كياهي صالح اداله ساوراغ علماء يغ إخلص، يغ جوسترو كبر حاصيلانبا ترلتاك فاذا كاممقوان ملاهيركن باياك كادر علماء سفنيغكاليا

مماغ، سفنيغكال كياهي صالح، فوندوك فسانتيرين دارت مولاي سوروت. فنروس فرتامانا يعني منانتوپا يغ برناما كياهي دحلان اسال ترماس فاجيتان. نامون، تاك لاما كموديان كياهي دحلان وفاة دي مكة دان تمفوك كشميفينان فوندوك فسانتيرين دفكاغ منانتو لايينا يغ برناما كياهي امير

كارنا ماسيه دالم ماسا فراغ ملاوان بلاندا دان جقاغ، فوندوك فسانتيرين دفينداهكن ك فكالوغان تمقات اسال كياهي امير. لالو سباكيان سانترى جوگا دباوا اوليه سانترى كياهي صالح يغ برناما كياهي ادريس ك جامسارين، سولو

ناما كياهي صالح دارت دي ماسا ايتو ساغات مشهور سانبيرو تانه جاوا، نوسنتارا، باهكان اسيا تگاراسا سباكاي فتوليس كتاب- كتاب فقه، تيولوكي، تصوف، سرتا علم فلك دغان كايا فيكون (برحروف عرب دغان بهاس جاوا) دان كياهي صالح داغكاف فيونيريا

اينيله يغ ممبيداكن دغان كاريا شيخ ارشد بانجار اتاو شيخ عبد الصمد قالمباغ اداله بهاسا يغ دفركوناكن علماء ايني. شيخ ارشد دان شيخ عبد الصمد ممفركوناكن بهاسا ملايو اونتوك فتوليسان بوكوپا. سمنتارا كياهي صالح منوليس دالم بهاسا جاوا. سهيغكا، ناما كياهي صالح لبيه ملكات دي كالاغن علماء دان سانترى



كيريكوسوما قنديرى فونوك فسانترين كي اكنك كيريكوسوما، مراغين، دماك، جاوا تغاه يغ تغاه منوناين عبادہ حج ايا مروفاكن علماء يغ ساغت برقران دالم معحاضر كن كياهي صالح فولاغ ك بومي سماراغ. مليهات كهيباتن كياهي صالح دارت ايتو امباه هادي مراسا ترفاغكيل اونتوك مغاجاكي فولاغ برساما-ساما ك تانه اير اونتوك مغباغن اسلام دان مغجار امة اسلام دي جاوا يغ ماسيه عوام نامون كارنا كياهي صالح تريكات 'كونتراك' دغن فغواسا مكة اونتوك منجادي فغاجار دي مكة، اجاكن فولاغ ايتو دتولاك. نامون امباه هادي مامكسايا كياهي صالح دارت دجوليك. اكار تيداك كتاهوان، ساعت ماو نايك كافال فولاغ ك جاوا، كياهي صالح دماسوكن ك دالم فتي برساما باراغ باوانيا. نامون دي تغاه جالن كتاهوان، امباه هادي منجوليك سالا سوراغ علماء مسجد الحرام. اخيريا فادا ساعت كافال مرافات دي فلابوهان سيغافورا، امباه هادي دتاغكاف دان دواجيكن ممبايار دندا فارا موريد امباه هادي يغ برادا دي سيغافورا مغتاهوي اخيريا ممباننو مپلسايكن مسئلة ايتو دغان مغومفولكن دانا اونتوك منبوس دندا كفاذا فغواسا مكة. اخيريا، امبه هادي دان كياهي صالح دارت برحاصيل ملانجوتكن فرجالانن دان برحاصيل مندارت ك جاوا تنتاغ كياي صالح دارت فرناه تيغكال دي سيغافورا (ماسيه ماسوق ولايه مليسيا ساعت ايتو) دكوي، باهكن لبيه جاوه دقصهكن بهوا كياهي صالح سمقات ممباغون سبواه لمباكا فنديديكن دي نكري سيغا ايني. حال ايني دبوكتيكن فروفيسور غزالي منير دالم بوكو فميكرن كلام محمد صالح دارت

ماسيه فناسارن دغان علم، صالح كموديان مغوتار اكن كايفينانيا بلاجار دي مكة. كياهي عمر ستوجو دان بربارغان دغان هاسرات ساغ اياه منوناين عبادہ حج. دي مكة ساغ اياه مغاراهكان اناكيا اونتوك بركورو كفاذا علماء-علماء بسار، انتارا لايين شيخ محمد المارقي، شيخ محمد سليمان حسب الله، شيخ سيد محمد زيني دحلان، شيخ زاهد، شيخ عمر الشاني، شيخ يوسف المصري سرتا شيخ جمال مفتي حنفي. بيرافا سانترى ساغكاتنيا، انتارا لايين شيخ محمد نووي بانتن (شيخ نووي الجاوي) دان شيخ خليل باغكالان سالا ساتو حال يغ ممباكياكنا كنيكا ايا سمقات بلاجر كفاذا شيخ سيد زيني دحلان، علماء تركموكا مكة يغ جوكا مفتي مذهب شافعي. كفاذا فغاراغ باياك كتاب ايني كياهي صالح دارت سمقات بلاجار احباء علوم الدين كاريا امام غزالي دان سكاليجوس مندافات اجازة دان سند

كتاب احباء تيداك چوكوف دكاجيبا ملالوي شيخ زيني دحلان، ايا جوكا بلاجار كتاب ايتو داري شيخ سيد محمد صالح الزواوي. كموديان ملالوي شيخ احمد نراوي المصري المكي ايا بلاجار كتاب الحكم كاريا شيخ محمد ابن عطاء الله. دوا كاريا اينيله يغ ساغات ممباس كفاذا سهيغكا ممبنتوك فريباديا سباكاي صوفي. دوا كتاب ايني سلانجوتيا منجادي اندالان كاجيانيا

مكة اداله ايبوكوتا علم فغتاهوان اسلام كالا ايتو سهيغكا علماء دان كتاب ماچام افافون بيسا دجومفاي دي سانا. حال ايني ممبوات كياهي صالح بكيو بتاه، اكتيف مغكاجي دان مقلاجاري سما علم فغتهوان يغ ادا. ايا ساغت منعمتي مليمفاها علم ملالوي ريبوان بوكو دان فولوهن علماء يغ سياف منجادي فغاجار دان فمبمبيغيا

سلاما دي مكة ايتو، منوروت فروفيسور دوكتور علي مسعود خلق الله دالم بوكو فميكران تصوف شيخ صالح دارت السامراني، كياهي صالح سمقات منكاح دان ممليكي سوراغ اناك لاي-لاكي يغ دبري ناما ابراهيم. حال اين دباديكان دالم كتابيا يغ برجدول فيض الرحمن، كياهي صالح ميبوت ديريبا ابو ابراهيم. تيداك ادا چاتان فاستي تاهون برافا كياهي صالح دي مكة سرتا لامايا منونتوت علم دي نكري ايتو. هاپا منوروت سومبر، صالح ك مكة جاوه سلوم كداتاغن فجابت هينديا بلاندا سنوق هورگونج فادا 3 اگوستوس 1884

ستلاه ساغ استري دي مكة وفاة، صالح كمبالي ك جاوا. ادا بيرافا فيرسي كفولاغانيا ك تانه جاوا. يغ جلاس، ابراهيم تاك مپرتايبا دان منوروت كوس لقمان حكيم، چيچيت كياهي صالح، ابراهيم وفاة كچيل سهيغكا تاك لايكي دسيغوغ دالم سجاره كياهي صالح كتبغكيان علم كياهي صالح دارت تيداك هاپا بيسا دليهات داري كاريا-كاريا مونومينتال دان كبرحاصيلن فارا سانترى منجادي فارا كياهي بسار تنافي جوكا بيسا دليهات داري فغاكوان فغواسا مكة كالا ايتو. ايا دقيليه منجادي سالا سوراغ فغاجار دي مكة. دي سينيله كياهي صالح دارت برتمو دغان امباه هادي

لقمان ميلغكاراكن حول دي مسجد كياهي صالح دارت سجاك
تاهون 2012 دغان مغازر كن حبيب لطفى بن يحيى

كاريا بسرپا

كاريا-كاريا كياهي صالح دتوليس دالم بهاسا جاوا دغن حروف
عرب فيكون. حال اين دليهات داري ببراڤا كارياپا يڭ دارهكن
اونتوك مشاركة سانترى دي جاوا. "بوكو ايبي دفرسمباهن كفاذا
اوراغ عوام دان اوراغ-اوراغ بودوه سقرتي سايا". دالم ترجماهن
متن الحكم فاذا قندا هولوانيا، كياهي صالح منوليس: "ايبي كتاب
ريغكاسان داري متن الحكم كاريا العلامة العارف با الله شيخ احمد
ابن عطاء الله، سايا ريغكاس سقرتيگا داري اصل، اكار موداهكن
ترهاداف اوراغ عوام سقرتي سايا، سايا ترجمهكن دغان بهاسا
"جاوا اكار چقات فاهام باكي اوراغ يڭ بلاجر اكاما اتاو مغازي
شيخ صالح دارت مماغ لبيه دكنال دغان كاريا-كاريا توليس دان
ترجماهنيا يڭ جملهها ادا 40 كتاب. كاريا-كاريا كياهي صالح
دارت يڭ سمفاي سكاراغ ماسيه دتربينكن يڭ برمعى ماسيه ادا
قميلي يڭ ممنفعتكنيا سباكاي باهن فلاجران اكاما
ستيداكپا، ادا دوا بلاس كتاب كياهي صالح يڭ ماسيه دبورو
:سانترى سلاما ايبي. انتارا لايين

مجموع الشرعية الكافية للعوام، سنبال 280 هالامان -

ترجمة سبيل العابد على الجوهره التوحيد سنبال 400 هالامان -

كتاب منجيات، متيك ساكيغ احياء علوم الدين، سنبال 196 -
هالامان

متن الحكم، سنبال 152 هالامان -

تفسير فيض الرحمن، سنبال 580 هالامان -

منهاج الاتقياء، سنبال 516 هالامان -

المرشد الوجيز في علوم القرآن العزيز، سنبال 126 هالامان -

شرح برده، سنبال 368 هالامان -

مانسك الحج والعمرة واداب الزيارة رسول الله، سنبال 64 هالامان -

كتاب فاصلاتن، سنبال 54 هالامان -

هداية الرحمن، سنبال 260 هالامان -

تفسير البرزنجي، سنبال 116 هالامان -

سبواه توكو بوكو اونلاين مناواركن 12 كتاب ايبي دغان هاركا
724.000. مماغ، تيداك سمويا ترچيتاك، ادا يڭ دالم بنتوك فوتو
كوفي دان دالم بنتوق ديگيتال

كاريا-كاريا كياهي صالح ايتو باپاك مونتيفاسي اوراغ جاوا
اونتوك بلاجر اكاما. ستلاه مغانل حروف القرآن مريكا لانتاس
برانجاك بلاجر علم اكاما يڭ دتوليس دغان اكسارا عرب ايتو.
حال ايبي يڭ مغانكن كاريني دغان كحاضيران كاريا تفسير
كياهي صالح يڭ دبوري جودول فيض الرحمن
مصطفى حلمي

السامراني، 2007

ادا ببراڤا فاكتا تنتاغ قران كياهي صالح دي سيغافورا. منوروت
غزالي منير، فرتامه اداله ادا سانترى كياهي صالح حاصيل
ديديكن فسانترينپا دي سيغافورا يڭ برناما عبدالله يوسف ترغونو
كدوا، تاك بياسايا كياهي صالح منوليس بوكو دالم بهاسا ملايو.
سواقتو دي سيغافورا ايا منوليس بوكو برجودول كيفية الصلاة
للمسافرين (چارا صلاة مسافر). كنيكا، دي سيغافورا ادا
فركامفوغان صالح دارت يڭ ساله ساتو وركا كامفوغ ايتو يڭ
برنام هاشم فرناه مغانتار وكيل فردانا منترى مليسيا داتوك موسى
.هيتم برزيرة ك مقام كياهي صالح دي سماراغ
محمد صالح تيبا دي فلايوهان سماراغ لاغسوغ دسامبوت تمان-
تمان اياها، ترماسوك كياهي مرتضى. كياهي صالح لاغسوغ
دتاريك مغاز دي فونوك فسانترين دارت ميليك كياهي
مرتضى يڭ كموديان منجادي مرتوپا ستلاه ميونتيج صافية.
سجاك كداتاغنيا، فسانترين ايتو بركمباغ فسات
دايا تاريك علماء برقنديديكن مكة ايتو ممبوات فسانترين ماكنيت
باكي سانترى-سانترى سقرتي كياهي شعبان، كياهي منور (كورو
القران نوسنتارا) يوگياكارتا، كياهي احمد دحلان يوگياكارتا،
كياهي ادريس، كياهي هاشم اشعري، كياهي محفوظ ترماس داتغ
منونتوت علم كفاذاپا

كافان فسانترين ايبي برديري، تيداك ادا كفاستيان. كياهي صالح
هاپا منروسكن اتاو مغهيدوفكن فسانترين يڭ ادا. هاپا، دفركير اكن
كياهي صالح مغازوه فسانترين ايبي فاذا تاهون 1880 ان. حال
اين دكموكاكن كياهي محمد علي خليل، چوچوپا. تافي، منوروت
ببراڤا قنليتي جوسترو ميبوت تاهون 1875، كارنا كياهي صالح
منوليس كتاب متن الحكم فاذا تاهون 1289 ه اتاو تاهون 1872
م. دي كتابيا ايتو ايا سواده ميبوت السماراني

جوگا، دالم اناليسا يڭ لايين ميبوتكن بهوا كياهي محفوظ ترماس
ترچاتات پانترى دي دارت دفركير اكن سبلوم تاهون 1870.
ارتيا، فسانترين دارت ديديريكن جاوه سبلوم ايتو
داري فرنكاحن دغن صافية ايبي، كياهي صالح مندافات دوا
اوراغ فوترا; يحيى دان خليل. داري يحيى دان خليل كياهي صالح
منورونكن اهلي وارث دي سماراغ يڭ برلانجوت هيغكا كيني
كياهي صالح جوگا ترچاتات فرناه منكاح دغن فوتري بوقاتي
فورورجا، جاوا تغاه، يڭ تيداك دسبوتكن ناماپا. داري فركاوينان
ايبي كياهي صالح مندافات ساوراغ فوتري يڭ دبوري ناما زهرة.
سانترى برناما دحلان اسال ترماس، فاجيتان، جاوا تيمور،
كموديان ميونتيجيا دان مميليكي ببراڤا اوراغ اناك. كياهي دحلان
وفاة دي مكة، زهرة كموديان منكاح دغان امير، سانترى كياهي
صالح جوگا يڭ تيغكال دي فكالوغن

ساياغ، منوروت علي مسعود، ناما بسار كياهي صالح تيداك
تركاوغ بنار كارنا كوراغ دوكون كلواركاپا دي سماراغ.
حول كياهي صالح دارت سفتوها دسلغكاراكن قارا موريد دان
سبمقاتيسانپا بايك يڭ دكات اتاو يڭ جاوه. والوفون كموديان كوس

Menjaga Warisan Amal Habibie



kemlu.go.id

Presiden ke-3 RI BJ Habibie memang telah dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Namun, warisan-warisan signifikan beliau terhadap bangsa dan negara masih menjadi buah bibir masyarakat hingga kini.

Industri dirgantara nasional adalah salah satu legasi penting yang ditorehkan BJ Habibie. Di bawah kepemimpinan BJ Habibie, putra-putri Indonesia ahli pesawat terbang yang tergabung dalam IPTN mampu menciptakan pesawat berteknologi tinggi *fly-by-wire* N250 yang 100 persen dirancang sendiri. Sekitar 20 tahun lalu, tepatnya 1995, pesawat N250 dengan nama Gatotkaca terbang disaksikan seluruh rakyat Indonesia dan publik dunia.

Presiden ketiga RI BJ Habibie bukan saja pelopor pembuatan pesawat di Indonesia. Eyang Habibie juga banyak meninggalkan warisan amal yang signifikan untuk Muslim Indonesia. Salah satunya, ia berperan besar dalam mendorong gerakan zakat di Indonesia. Ketika menjabat sebagai presiden, Eyang Habibie yang menandatangani pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU Zakat yang ditandatangani Habibie tersebut juga melahirkan Baznas sebagai sebuah lembaga zakat yang dikelola negara. Selain



Foto Keluarga BJ Habibie

wikipedia.org

itu, beliau juga mengukuhkan lembaga amal zakat (LAZ) sebagai gerakan masyarakat dalam pengelolaan zakat.

Eyang Habibie juga dikenal menjadi pendorong lahirnya tiga serangkai media dakwah umat, yakni Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Bank Muamalat, dan Harian Umum Republika. Tak berhenti sampai di situ, amal sholeh Eyang Habibie juga banyak dirasakan oleh generasi penerus bangsa dengan program pengiriman anak-anak bangsa berprestasi melalui program beasiswa Habibie. Saya sebagai generasi muda merasa bangga punya teladan seperti Eyang Habibie, apalagi kini saya bekerja di salah satu

warisan beliau, sebagai editor di Harian Republika.

Maka itu, sudah sepatutnyalah saya ikut merawat legasi BJ Habibie di bidang media, seperti juga para penerus Habibie yang lain merawat industri dirgantara nasional agar terus hidup dan berkembang. Tak ada alasan untuk tak mendukung karya anak negeri ini. Sebab, mimpi Indonesia untuk memiliki industri pesawat terbang sudah tumbuh sejak era kepemimpinan Presiden Sukarno. Bapak pendiri bangsa itu memiliki cita-cita agar putra-putri bangsa mampu membuat pesawat terbang sendiri. Kinilah saatnya pemerintah dan seluruh elemen bangsa memberi dukungan

penuh untuk kembali membangkitkan industri dirgantara nasional.

Semasa hidupnya, Habibie pernah memimpin PTDI yang kala itu bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Di bawah ke pimpinannya, mengudara mahakarya Pesawat N-250 yang menjadi pesawat terunggul di kelasnya pada saat itu. Prototipe N-250 masih tersimpan apik di hanggar PTDI. Rencananya, pesawat N-250 buatan pertama ini akan di museumkan.

N-250 merupakan karya fenomenal yang membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang bisa mengembangkan industri pesawat terbang. N-250 pertama kali dikembangkan pada 1986. Beberapa tahun dikembangkan oleh tangan-tangan engineer Indonesia, akhirnya pada 1995 N-250 bisa mengudara untuk pertama kalinya. N-250 bahkan sudah terbang berkeliling dunia. Pesawat ini juga sempat tampil dalam ajang bergengsi *Paris Air Show* yang membuat dunia terkaget-kaget.

Namun, kondisi krisis moneter Indonesia pada 1998 menjadi titik berakhirnya mimpi N-250 sebagai karya besar Indonesia. Indonesia yang saat itu membutuhkan bantuan pendanaan dari *International Monetary Fund* (IMF) terpaksa mengubur mimpi memassal-



kapanlagi.com

kan N-250.

Kita bisa belajar banyak bagaimana Habibie mengurai benang kusut krisis moneter 1998. Krisis ekonomi yang menyebabkan sejumlah negara di ASEAN terpuruk, tapi Habibie dengan kecermatannya mampu mengembalikan muruah makro ekonomi Indonesia.

Kepiawaiannya memecahkan rumus fisika dan matematika dia analogikan dalam mencari solusi persoalan ekonomi. Sejumlah indikator

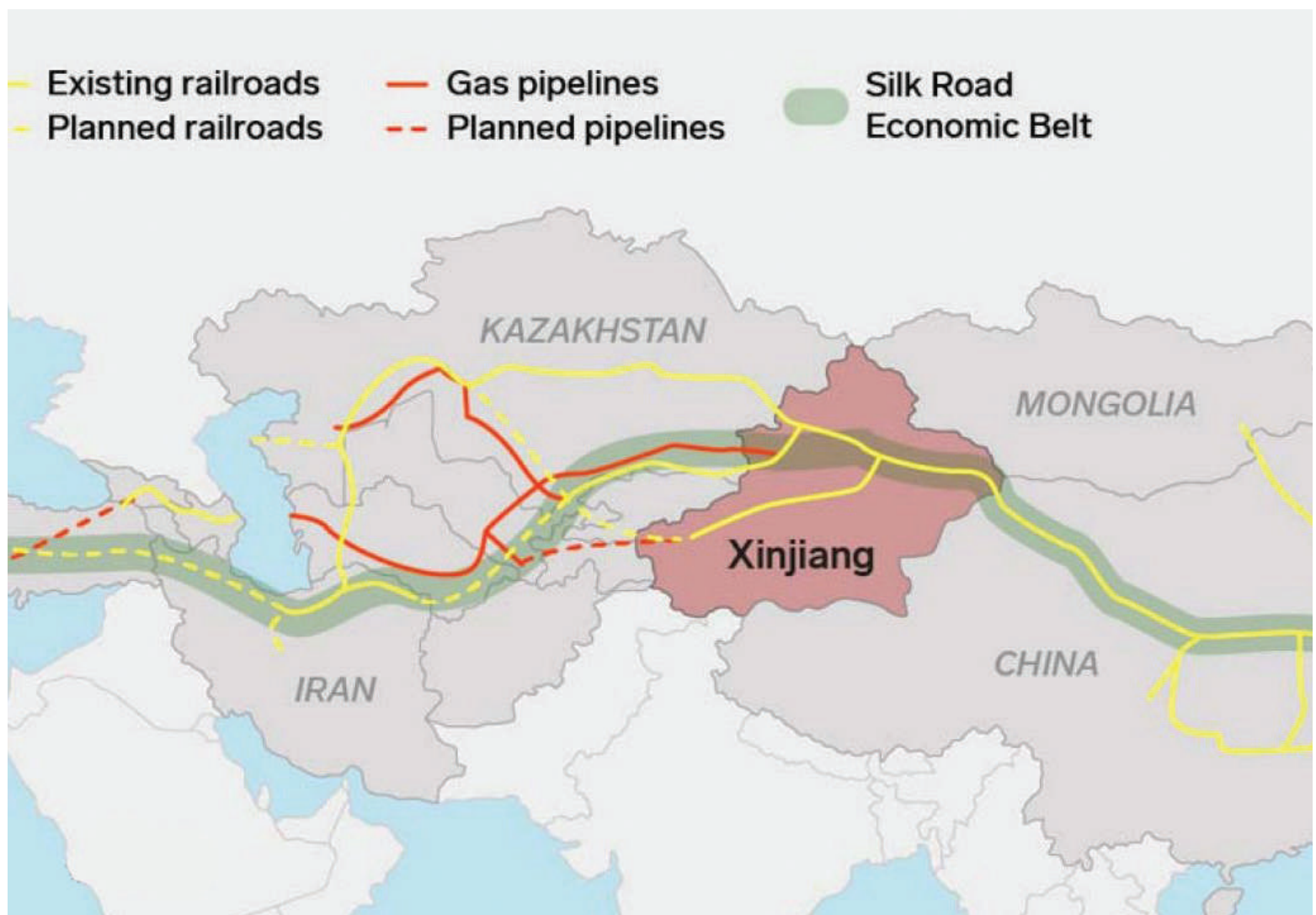
ekonomi makro pun menuju titik kestabilan saat krisis moneter menerjang.

Kecerdasannya tak hanya dalam ranah iptek, tapi juga kecemerlangan keimanan dan ketakwaan atau biasa Habibie menyebutnya sebagai imtak. Tak heran bila Habibie bisa menyelaraskan kehidupan beragama dalam membangun bangsa. Berpadulah dalam dirinya kecerdasan iptek dan imtak. Habibie bisa menampilkan Islam yang kafah, Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam..

Kini, Eyang Habibie telah berpulang kepada Sang Khalik, namun sebagai generasi penerus bangsa yang terpenting adalah bagaimana merawat warisan amalnya. Kebaikan dan amal sholeh Habibie yang banyak diperbincangkan di hari ketika beliau menghembuskan nafas terakhir semoga menjadi indikator bahwa beliau meraih predikat husnul khotimah. Aamiin.

■ Muhammad Fakhruddin



Setelah perjalanan udara tiga jam lebih dari Beijing, kami disambut guyuran salju di Kota Urumqi. Suhu udara di Ibu Kota Xinjiang sore (Rabu, 20 Februari) itu, minus 14 derajat celsius. Tubuh yang biasa dimanja hangatnya cuaca khatulistiwa rasanya tiba-tiba menggigil kedinginan.

Pemerintah setempat menyambut kami, sebagai delegasi dari Indonesia, dengan acara seremonial di VIP lounge Bandara Internasional Diwopu. Setelah itu, tim ormas Islam beranggotakan 17 orang (MUI, NU, Muhammadiyah dan sejumlah wartawan) di bawah pimpinan KH. Muhyiddin Junaidi ini, dibawa ke stasiun kereta api bawah tanah, untuk menuju ke hotel.

Rupanya tuan rumah sengaja mengajak tamu undangannya menikmati fasilitas transportasi publik berupa kereta bawah tanah seperti halnya di kota-kota modern lainnya. Ya, kondisi kereta bawah tanah di Urumqi masih baru, tak ubahnya seperti MRT yang kita nikmati di Jakarta.

Infrastruktur Kota Urumqi cukup lengkap untuk disebut sebagai salah satu kota modern di Tiongkok. Ini misalnya bisa dilihat bahwa di samping kereta bawah tanah tadi, ada sejumlah plaza yang luas, taman-taman kota serta sejumlah jalan layang melingkar-lingkar di antara gedung-gedung tinggi yang atapnya dipenuhi salju itu. Bisa dibandingkan, secara

Jalan Sutra:

Xinjiang

Sebagai Pintu Gerbang

“Catatan perjalanan: Nasib muslim di Xinjiang harus kita perjuangkan dengan diplomasi yang baik, mengambil momentum di tengah terjadinya perang dagang Tiongkok lawan Amerika Serikat.”

jejakapak.com



travelchinaguide.com



Rombongan MUI, NU DAN Muhammadiyah melakukan pengecekan ke dalam kelas.

fasilitas dan sarana, kota Urumqi sudah berada di atas rata-rata kota propinsi di Indonesia.

Luas wilayah Propinsi Xinjiang, seperenam dari wilayah RRC. Inilah wilayah yang terbagi antara pegunungan dan hamparan tanah pertanian subur yang terletak paling barat dari negeri Tembok Besar itu. Di tengah-tengah wilayah Xinjiang berdiri kokoh Gunung Tianshan, salah-satu gunung tertinggi di Tiongkok, yang sepanjang tahun diselimuti salju.

Di sebelah selatan berdiri Pegunungan Himalaya yang menjadi batas wilayah ini dengan Tibet dan India. Gunung Artai yang ada di sebelah utara menjadi garis pemisah antara Propinsi Xinjiang den-

gan Rusia. Sebagai daerah dingin nan subur, Xinjiang menjadi salah-satu gudang buah-buahan dan sayuran seperti berbagai macam jenis anggur, walnut, aneka macam delima dan lain-lain. Berbagai macam buah ini diekspor ke berbagai negara.

Aneka anggur kering yang biasa ditemui para jamaah haji dan umroh di pelbagai toko di Mekah dan Madinah, salah-satunya berasal dari Wilayah Xinjiang (terutama dari daerah Kashgar dan Houtan) dan negara Asia Tengah lainnya. Begitu juga dengan buah walnut yang dikenal sebagai buah dengan aneka vitamin yang berhubungan dengan syaraf kecerdasan otak itu, berasal dari daerah ini. Wilayah Xinjiang murni tanah

daratan dan pegunungan tanpa akses lautan.

Xinjiang bagian barat langsung berbatasan dengan negara-negara Asia Tengah seperti Kirgistan, Kazakhstan, Tajikistan. Agak ke Barat Laut, Xinjiang berbatasan langsung dengan Kasmir dan Afghanistan. Jika selatan dan utara dihadang tebing-tebing tinggi dan pegunungan bersalju, batas wilayah barat Xinjiang semuanya berupa tanah datar. Dari batas wilayah barat inilah Tiongkok akan membuat pintu gerbang strategis perdagangan jalur sutera menuju negara-negara Asia Tengah sampai ke Eropa.

Tiongkok menyebut jalur strategis perdagangan ini dengan istilah *One Belt One Road* (OBOR). Tak tanggung-tanggung. Jika di masa lalu jalan sutera itu hanya berupa jalan darat dari Kerajaan Tiongkok ke Kerajaan Romawi di Eropa melewati Asia Tengah, kini Tiongkok membuat jalan sutera itu berjalur ganda: darat dan laut. Tujuannya untuk membuka kembali perdagangan jalur sutera seperti masa lalu, namun dengan volume perdagangan yang jauh lebih besar.

Jalan darat yang lebar dilengkapi dengan rel kereta api akan menembus Asia tengah sampai ke Eropa. Negara-negara seperti Italia dan Spanyol sudah berkomitmen dengan Tiongkok untuk



China's 'One Belt, One Road'.

melakukan kerja-sama perdagangan dalam rangka OBOR ini. Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya juga terlibat dalam kerja-sama OBOR lewat jalur lautan.

Rencana strategis Tiongkok ini tak disukai Amerika Serikat. Jika rencana ini sampai terealisasi dapat dipastikan ekonomi Tiongkok akan tumbuh makin melesat. Pada giliran berikutnya pasti pula tak akan terkejar oleh negara manapun, termasuk oleh AS sendiri. Kekhawatiran ini oleh pihak AS kemudian dijadikan propaganda ke berbagai negara dengan target agar Tiongkok menjadi musuh bersama negara-negara lain.

Kampanye untuk menyip-

takan ketakutan pada Tiongkok dengan proyek OBOR-nya itu terjadi di mana-mana. Digambarkan sedemikian rupa seakan-akan proyek OBOR itu tak ubahnya seperti penjajahan ekonomi model baru yang siap merambah ke pelbagai negara, termasuk Indonesia. Aneka informasi diguyur lewat multi platform (memakai metode *firehose of falsehoods*) berbasis digital dan media lainnya, sehingga publik di berbagai negara sulit membedakan mana informasi yang benar dan tidak benar. Maka, terciptalah kekhawatiran dan ketakutan terhadap pihak Tiongkok.

Penciptaan rasa takut seperti itu bahkan akhir-akhir ini

melanda Indonesia. Di saat seperti itu pula AS akhirnya menabuh genderang: memulai perang dagang secara terbuka terhadap Tiongkok. Targetnya agar pertumbuhan ekonomi Tiongkok tersendat, tidak sampai mencederai kedikdayaan AS sebagai satu-satunya polisi dunia. Akibat lanjutannya?

Pahit akibat perang dagang AS Tiongkok ini tak hanya dirasakan oleh kedua negara raksasa ekonomi itu, tetapi juga dirasakan negara-negara lain. Termasuk mulai dirasakan di Indonesia. Bahkan, akibat berikutnya perekonomian global saat ini terancam resesi.

###

Sebagai pintu strategis OBOR, Xinjiang berpenduduk 23 juta jiwa. Sebanyak 10 juta jiwa adalah penduduk muslim. Ini adalah jumlah mayoritas karena penghuni wilayah ini multi etnis dan multi agama. Di samping, tentu saja terdapat penduduk Xinjiang yang berasal dari Suku Han yang menjadi suku mayoritas di Tiongkok.

Suku Han pada umumnya penganut atheisme, doktrin yang sengaja dikondisikan dan dikehendaki oleh Partai Komunis Tiongkok. Konstitusi Tiongkok memang menjamin setiap penduduknya untuk memeluk agama apapun. Tetapi negara lebih menginginkan, jika penduduk Tiongkok tak memeluk agama.

Etnis Uyghur sebagai penduduk mayoritas di Wilayah Xinjiang tersebar di tiga wilayah. Sebagian besar mereka tinggal di Urumqi, sedang lainnya tersebar di dua wilayah yang bersebelahan: Kashgar dan Houtan. Dua wilayah yang kalau di Indonesia setingkat kabupaten itu terletak paling barat dari Tiongkok, berbatasan langsung dengan Pakistan. Di sepanjang kiri-kanan jalan kedua wilayah ini sangat mudah ditemui perkebunan buah walnute dan anggur dengan kualitas premium.

Menyaksikan beberapa bangunan kuno di Wilayah Kashgar dan Houtan, nam-



Sebagian Peserta vokasional yg dituduh radikal di wilayah Kashgar.

pak jelas sisa-sisa arsitektur kekayaan Islam masa lalu. Ini terlihat pada bentuk-bentuk bangunan masjid, sejumlah pertokoan yang menjadi semacam bazar atau plaza tempat penduduk berkumpul. Alat-alat musik tradisional yang dijual di sejumlah pertokoan juga lebih berciri khas latar belakang budaya Islam, dari pada kebudayaan Tiongkok.

Di dua wilayah Ini pula terdapat pusat konsentrasi pelatihan vokasi terhadap penduduk muslim yang selama ini banyak mendapat sorotan internasional. Delegasi Indonesia dipersilakan mengunjungi tempat-tempat pelatihan ini, bahkan dipersilakan melakukan wawancara

langsung dengan para peserta pelatihan vokasi.

Dari sudut pandang Tiongkok, penduduk muslim di pusat-pusat konsentrasi pelatihan ini dianggap terpapar paham Islam radikal. Karena itu, mereka harus mengikuti kegiatan vokasi dengan sangat ketat, mulai dari Senin sampai Jumat. Pada hari Sabtu dan Ahad para peserta dapat jatah libur dan bisa pulang ke rumah masing-masing. Tentu saja bukan cuma pelajaran vokasi yang terkait keterampilan (*life-skill*) yang harus diikuti para peserta. Selain itu, para peserta juga wajib mengikuti indoktrinasi yang terkait dengan ideologi negara, konstitusi serta undang-undang yang harus dipatuhi.

Bagaimana menentukan seorang peserta dianggap terpapar paham radikalisme atau tidak? Ini sangat subyektif yang ukuran dan keriterianya tergantung pada selera penguasa Partai Komunis Tiongkok di lapangan. Sekadar contoh, orang yang ingin menaati agamanya dengan baik, dengan cara menghindari makanan yang tidak halal, bisa dikategorikan sebagai terpapar paham radikal.

Bukan cuma itu, seperti yang digambarkan oleh sejumlah peserta vokasi pada delegasi Indonesia: betapa banyak tindakan berlebihan, ekstra ketat yang sebenarnya tidak diperlukan. Bahkan, ada kecenderungan dari pemerintah untuk menciptakan kondisi agar anak muda Islam Xinjiang permisif terhadap ajaran agamanya. Di sinilah letak peliknya persoalan yang

dihadapi kaum muslimin di Tiongkok, khususnya Xinjiang. Mengapa?

Di mata Pemerintah Tiongkok, Xinjiang memang mesti diwaspadai karena punya sejarah radikalisme dan teror yang sangat mengganggu pemerintah. Sementara Tiongkok punya rencana besar mengenai pembangunan ekonomi berskala global yang pintu gerbangnya terletak di daerah ini: Proyek OBOR tadi.

Maka karena itu, pemerintah membuat kebijakan dan pendekatan keamanan yang ketat. Namun, di sisi lain ada pendekatan kesejahteraan berupa kewajiban mengikuti pendidikan vokasi bagi mereka yang dianggap terpapar radikalisme. Harapannya, setelah lulus para peserta itu sudah tidak terpapar lagi dengan paham Islam radikal serta bisa segera mendapat lapan-

gan pekerjaan.

Delegasi Indonesia sebelum berkunjung ke tempat-tempat pelatihan keterampilan ini, terlebih dahulu diajak ke suatu gedung besar yang terletak di pinggir kota Urumqi. Dalam gedung itu, delegasi Indonesia disuguhi narasi-narasi berupa gambar para korban terorisme, alat dan senjata api dari berbagai jenis yang pernah digunakan para teroris di Xinjiang serta berbagai korban dan kerusakan yang ditimbulkannya.

Dari narasi gambar itu, tuan rumah secara implisit seakan-akan hendak mengatakan begini: "Xinjiang punya masa lalu yang kelam dengan terorisme. Karena itu, wajar jika Tiongkok mengambil tindakan tegas. Tetapi tak hanya tindakan tegas belaka, Tiongkok juga punya solusi kesejahteraan dengan membuat pelatihan keterampilan untuk penduduk yang terpapar paham radikalisme."

Tetapi Barat, khususnya AS tetap menampik berbagai dalih Tiongkok itu, termasuk terhadap kegiatan vokasi ini. Bagi media massa Barat dan AS kegiatan vokasi itu sama dengan *camp* konsentrasi yang melanggar hak-hak asasi manusia. Penilaian yang wajar, karena di balik itu Barat khususnya AS memang sengaja mencari masalah terhadap Tiongkok.

Apapun yang dilakukan



Penduduk Muslim China.

Journal.org

Tiongkok terhadap etnis Uyghur pasti dianggap melanggar HAM oleh pihak Barat. Apalagi, pada kenyataannya, ada sejumlah aktivis dan pejuang etnis Uyghur yang memperjuangkan kemerdekaan Xinjiang dari Tiongkok terus bergerak di ranah internasional. Pengakuan para pejuang Uyghur di luar negeri ini dijadikan senjata dan alasan oleh pihak Barat untuk menyudutkan Tiongkok telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap etnis Uyghur di Xinjiang.

Tiongkok, sebaliknya menolak tuduhan Barat tersebut. Tiongkok juga tahu, bahwa di balik tuduhan Barat dan AS itu ada udang di balik batu. Yakni, persaingan ekonomi. Itulah sebabnya, lantas Tiongkok mengundang sejumlah negara netral termasuk delegasi dari Indonesia, dengan harapan: bisa melakukan penilaian yang obyektif. Delegasi Indonesia tentu saja tak ingin mengikuti tarian atas gendang AS. Tetapi juga jangan sampai kita terperangkap dalam jebakan dan rayuan Tiongkok.

###

Delegasi Indonesia punya prinsip bahwa, untuk menghadapi Tiongkok penggunaan soft diplomasi lebih diutamakan, dari pada memakai hard diplomasi. Hubungan antara Indonesia dan Tiongkok yang selama ini sudah terbangun dengan baik mesti



Delegasi berkunjung ke Exhibition on Major Violence Terrorist Attack Cases in Xianjing.

di dimanfaatkan untuk memperjuangkan nasib saudara muslim di Xinjiang. Apalagi, kondisi hubungan dipomatik kedua negara saat ini bukan hanya diplomasi dalam bentuk *Government to Government* (G to G), tetapi sudah ke tahap rintisan hubungan dalam bentuk *people to people*.

Artinya, selama ini sudah terjalin hubungan baik antar masyarakat kedua negara. Hanya saja hubungan tersebut dimanfaatkan sebatas dalam konteks bisnis dan perdagangan. Ke depan, dimensi ruangnya mesti diperluas ke arah: bagaimana agar kaum muslim di Indonesia bisa membantu saudaranya di Xinjiang.

Tahapan langkah konkret berikutnya sebagai tindak lanjut: bagaimana agar nasib saudara kami kaum muslimin di Xinjiang itu mengalami perbaikan-perbaikan terutama dalam hal jaminan untuk melaksanakan hak-hak ibada-

dah selama mengikuti pelatihan vokasi. Sebab, menurut pengakuan para peserta vokasi, mereka sulit melakukan ibadah selama mengikuti kegiatan vokasi.

Alasan pemerintah Tiongkok, undang-undang melarang siapa saja melakukan peribadatan di waktu kerja atau di tempat kerja. Aturan peribadatan di Tiongkok adalah bersifat privat. Maka, silakan melaksanakan ibadah tetapi harus di tempat ibadah yang telah ditentukan. Misalnya saja, ibadah bisa dilaksanakan di rumah atau di tempat yang telah ditentukan seperti masjid atau gereja atau tempat ibadah yang lain.

Dengan demikian, pemerintah punya alasan kuat melarang pelaksanaan peribadatan saudara kita kaum muslimin (*shalat* lima waktu) di tempat kerja. Sementara di pihak lain, hak melaksanakan ibadah bagi setiap orang merupakan



Delegasi Indonesia saat mengunjungi Provinsi Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China.

hak dasar yang dilindungi secara internasional.

Nah, hak dasar itu tidak dipenuhi oleh negara.

Dua kepentingan ini seakan bersebrangan secara diametral, tetapi sebenarnya bisa dicarikan solusi untuk mendapatkan titik-temu. Pemerintah Tiongkok selama ini beranggapan jika peserta vokasional itu diperbolehkan melakukan ibadah, pasti akan merepotkan karena harus menyiapkan tempat ibadah seperti mushalla atau masjid di tempat kerja. Padahal tidak demikian. Ada cara sederhana untuk menemukan solusi. Bagaimana?

Berikan saja kesempatan para peserta itu melaksanakan *shalat* di tempat istirahat masing-masing. Caranya, peserta dipersilakan menggandeng

waktu *shalat* (*jamak takdim*) dzuhur dengan *shalat* asar, begitu pula saat *shalat* maghrib digabung dengan *shalat* isya di tempat istirahat masing-masing. Pelaksanaan ibadah ini memakan waktu paling lama 10 menit, sehingga tidak akan mengganggu jatah waktu jam istirahat siang.

Ini hanya sekadar contoh. Tentu saja hal ini bisa dilakukan jika Pemerintah Tiongkok tidak keberatan. Cara agar Pemerintah Tiongkok tidak keberatan, di sinilah peran Pemerintah Indonesia untuk memainkan diplomasinya secara baik, dengan tetap menjaga untuk masing-masing negara tidak saling merasa diintervensi.

Dalam bingkai diplomasi seperti ini, peran yang mesti dimainkan tidak hanya orang-

orang yang berada dalam birokrasi pemerintah yang melaksanakan tugas tersebut, tetapi bisa memakai tokoh-tokoh masyarakat dan ormas Islam yang kompeten untuk tugas diplomasi ini.

Pekerjaan seperti ini tidak bisa dilaksanakan dalam waktu jangka pendek. Tetapi harus berdimensi jangka panjang dengan strategi dan taktik serta perencanaan dan pelaksanaan yang matang.

Menggunakan strategi *soft* diplomasi seperti ini akan lebih efektif, dari pada “berteriak-teriak” model *hard* diplomasi AS dengan menyatakan Tiongkok melanggar HAM Internasional. Bagusya lagi, kita tidak ikut-ikutan menari atas tabuhan gendang orang lain.

■ **Masduki Baidlowi**

Memahami Sebuah Film



Menonton film adalah kegiatan mengasyikkan, terutama jika ceritanya bagus dan menarik, jalan ceritanya logis dan masuk akal (baik plotnya sungsang maupun runut), adegan-adegannya seru dan memancing penonton untuk tahu lebih banyak. Tapi ada kala menonton jadi membosankan, misalnya jika ceritanya jelek, tidak logis, penuh kekerasan, menghadirkan suasana seram dan lain-lain.

Film dan Sensor Film

Menurut Peraturan Pemerintah No: 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film pasal 1 ayat 1, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari peredaran pasal 1 ayat 2:

“Film adalah karya senibudaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan

kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.”

Sedangkan sensor film adalah: “Penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepadak halyak



youtube



breakingnews.co.id

umum.” (PP No: 18/2014 pasal 1 ayat 2 dan Permendikbud No: 24/2019 pasal 1 ayat 1)

Sesungguhnya menonton, melihat dan atau memahami film tidak akan jauh dari ke 2 pengertian di atas. Lihatlah film sebagai sebuah karya seni budaya dalam arti hasil kreasi manusia berdasar imajinasi yang dimilikinya. Bisa jadi ia berasal dari peristiwa sesungguhnya (*based on the true story*) atau seratus persen khayalan manusia. Kedua-duanya ketika menjadi film tetap bukanlah hal sebenarnya. Jika ada orang ditembak mati, itu hanya sebuah pengadeganan saja,

dan tentu tidak benar-benar ditembak. Jika ada adegan kota hancur berkeping-keping karena di bom atom atau dirusak oleh makhluk aneh super raksasa yang sedang mengamuk, tentu itu bukan kejadian yang sebenarnya.

Sebagai pranatasosial dan media komunikasi massa, film adalah penggambaran yang terjadi di masyarakat dalam tatanan hidup sehari-hari, dan menjadi alat untuk menyampaikan pesan-pesan moral kepada penontonnya. Jika sebuah film yang dibuat dengan biaya bermilyar rupiah tapi tak berhasil menyampaikan

pesan apa pun, maka dia adalah sebuah film yang gagal.

Secara teknis ia dibuat berdasarkan kaidah-kaidah sinematografi, ada alur inti cerita *scene by scene*-nya itu skenario, ada pengarah adegan atau sutradara, ada para pemeran, dialog, tema, suara musik atau lagu sebagai *sound track* dan lain-lain. Pada jaman awal, film hanya sebagai gambar bergerak tanpa suara (film bisu), tapi setelah era tersebut seluruhnya sudah dengan suara. Semuanya itu direkam –di masa lalu-- memakai pita *seluloid* dan masa kini memakai teknologi digital. Bahkan kini bisa dengan alat *shooting* sederhana seperti *handphone* atau gawai. Menjadi penting, adalah apakah rekaman tersebut dapat dipertunjukkan atau tidak. Jika tidak dapat dipertunjukkan maka ia bukan sebuah film. Lantas, ada beda jika jika film itu dikonsumsi sendiri atau dipertunjukkan kepada khalayak. Jika dipertunjukkan, dia harus mengantongi STLS (Surat Tanda Lulus sensor) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film (LSF RI).

Lalu apakaitannya dengan pengertian sensor? Jika LSF menyensor film karena tugas pokoknya memang seperti itu, maka masyarakat juga harus menyensor film dalam makna film apa yang layak untuk mereka tonton, baik olehnya pribadi maupun

keluarga. Pengertian ini yang kemudian berkembang menjadi sensor mandiri (*self censorship*). Maka seorang penonton yang baik adalah mereka yang menonton film bukan hanya mencari hiburan tetapi juga dengan semangat ingin tahu atau meneliti, menilai dan menentukan apakah film tersebut layak untuk dipertontonkan kepada umum atau ditonton sendiri.

Tugas penyensoran sejatinya adalah penelitian kebenaran. Panduan *qur'aninya* adalah semangat tabayyun seperti termaktub dalam surah Alhujurat ayat 6: “*Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasiq membawa berita, maka tabayyunlahdst*”. Dalam konteks film yang perlu ditabayyun adalah apakah film tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini UU No: 33/ 2009, PP No: 18/2014 dan Permendikbud No: 24/2019, dan yang UU yang terkait seperti UU No. 44/2009 Tentang Pornografi dan lain-lain.

Apa yang boleh dan tak boleh dalam sebuah film?

UU Nomor 33 Tahun 2009 pasal 5 menyatakan: Kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilakukan berdasarkan kebebasan berkreasi, berinovasi dan berkarya dengan

menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa.

Ayat ini mengandung dua esensi yaitu kebebasan dan pembatasan. Kebebasan berkreasi, berinovasi dan berkarya menjadi pijakan atau dasar. Tetapi juga diberi pembatasan yaitu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa.

Selanjutnya, pasal 6 menyatakan: Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dilarang mengandung isi yang:

- a. Mendorong khalayak melakukan kekerasan dan perjudian, penyalahgunaan narkoba
- b. Menonjolkan pornografi
- c. Memprovokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antar suku, antar ras dan/atau antar golongan
- d. Menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama
- e. Mendorong khalayak melakukan perbuatan melawan hukum
- f. Merendahkan harkat dan martabat manusia

Film-film luar yang masuk ke Indonesia nyaris tak sepi dari unsur-unsur yang dilarang tersebut, khususnya kekerasan, penyalahgunaan narkoba dan pornografi. Bahkan film Indonesia pun ada yang ‘berani’ *nyerempet-nyerempet* wilayah rawan itu.

Kaitannya dengan huruf d.

yaitu menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama, khusus film Indonesia dan film dari beberapa negara Asia, ada beberapa yang bersentuhan dengan dunia mistis.

Kata mistisisme itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu (*mistikos*) berarti rahasia, serba rahasia, tersembunyi, gelap atau terselubung dalam kekelaman. Sementara paham mistik atau mistisisme adalah paham yang memberikan ajaran yang serba mistis, ajarannya berbentuk serba rahasia, tersembunyi, gelap atau terselubung dalam kekelaman.



degelan.co



Dalam buku PORNO MEDIA, KOSTRUKSI SOSIAL TEKNOLOGI TELEMATIKA DAN PERAYAAN SEKS DI MEDIA MASSA (Jkt: 2013) Burhan Bungin menulis bahwa tayangan mistik itu ada 3 macam: (1) Mistik semi sains (fiksi ilmiah). (2) Mistikfiksi (mengutamakan kengerian dan suasana mencekam), dan (3) Mistik horror (eksploitasi dunia lain). Yang sering muncul dalam film-film, baik dari dalam maupun luar negeri adalah mistik jenis ke 2 dan ke 3.

Pengaruh atau dampak film horror cukup dahsyat. Bagia-

nak-anak dan remaja adalah munculnya kenderungan suka mempercayai hal-hal irrasional, serta lebih takut kepada hantu daripada tuhan. Sementara bagi orang dewasa, menjerus kepada kemusyrikan ketika tema / isi ceritamempercayai kekuatan magis barang atau benda pusaka seperti keris, tosanaji, bermacam batu aji, mantra-mantra yang diperlakukan melebihi kitab suci dan lain-lain. Yang tak kalah gawat adalah peluang terjangkit penyakit *skizofrenia* (gangguan mental, delusi, halusinasi sampai perubahan perilaku.

Namun demikian, ada penelitian yang menyatakan bahwa makin sering nonton film horror lama-lama tidak takut lagi sama hantu. Uniknyanya, tak jarang film horror lebih terasa lucu daripada takut karena sutradara gagal menghadirkan suasana mencekam. Namun demikian, secara umum film horror itu tidak layak untuk anak-anak dan remaja.

Untuk melakukan penelitian dan penilaian, Permen-dikbud Nomor 24/2019 pada pasal 5 memberikan panduan yaitu harus memperhatikan: a. acuan utama dan b. acuan pendukung. Acuan utama meliputi konteks, tema dan nuansa. Adapun konteks adalah keterkaitan film dengan kesatuan narasi, latar, ekspresi adegan dan dialog, kejelasan tujuan, relevansi serta kerumitan. Contoh adalah keharaman rokok sebagaimana difatwakan oleh MUI. Dalam film Sudirman, ada beberapa adegan merokok yang dilakukan Sang Jenderal. Dalam keadaan terbatuk-batuk karena sakit paru-paru Pak Dirman memimpin gerilya melawan Belanda. Jika adegan merokok Pak Dirman dibuang, maka konteksnya lepas. Sang tokoh bukan lagi Pak Dirman yang dikenal masyarakat.

Tema adalah gagasan dan pikiran utama yang terkandung dalam sebuah film. sebuah film bisa bertemakan konflik rumah tangga, kenakalan



suaradewan.com

remaja, konflik sosial, perjuangan, pengalaman religius dan lain-lain. Sedangkan nuansa dan dampak adalah berbagai variasi atas kombinasi audio visual yang dapat menimbulkan persepsi dan akibat terhadap pikiran, perasaan dan perilaku penonton. Jika adu dua makhluk lain jenis berdua lalu ada latarbelakang suara yang *bla....bla...* maka persepsi penontong menganggap mereka berdua sedang melakukan sesuatu...*dst.* maka pikiran penonton tidak mustahil akan berkeliaran ke mana-mana.

Acuan pendukung terdiri judul, adegan visual, dialog atau monolog dan teks terjemahan. Judul adalah miniaturnya cerita. Seyogyanya begitu melihat judul, penonton sudah bisa memperkirakan cerita film yang akan ditontonnya. Sering kali judul tampak aneh dengan kesukaan para sineas mempergunakan bahasa asing

sebagai judul, atau judul yang rumit dan lain-lain. Walhasil menonton film memang dimulai sejak judul, tema, konteks, nuansa, adegan visual, dialog sampai ke dampaknya.

Sensor Mandiri

Sulit dipungkiri bahwa kemajuan teknologi membawa perubahan pada perilaku masyarakat. Kini siapa pun dapat langsung berinteraksi dengan media massa. Masyarakat dapat mengisi konten media massa karena kendali akses dan hubungan informasi ada di tangan individu-individu. Kini pun menonton film dapat dilakukan kapan saja, di mana saja dan dengan siapa saja. Maka kecerdasan penonton memilih tontonannya sangat diharapkan. Ditambah dengan semakin banyaknya film yang beredar melalui berbagai media (tidak hanya bioskop), jika penyensoran

diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, dalam hal ini Lembaga Sensor Film, tentu tak akan tertangani. Sensor oleh masyarakat menjadi keharusan. Itulah sensor mandiri yang kurang lebih merupakan perilaku sadar dalam memilih dan memilih film yang akan diproduksi, diperlihatkan dan/atau ditonton.

Dalam tugas seperti itulah penulis hadir sebagai anggota LSF periode 2015-2019 yang akan segera mengakhiri tugas ini. Proses seleksi telah dimulai, yang dapat diikuti siapa saja. Seleksi dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian disaring di Komisi I DPR RI dan akhirnya di SK kan oleh Presiden RI.

■ **Imam Suhardjo HM**
(Ketua Komisi Infokom 2011-2015)

CONGRATULATION



THE INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONFERENCE



Golden Palace Hotel, Mataram, Nusa Tenggara Barat

10 - 11 Oktober 2019

